

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pembangunan Manusia

Dalam ilmu pembangunan manusia, terdapat berbagai teori yang menjelaskan proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu dan masyarakat dapat berkembang secara holistik. Menurut Sen (1999), pembangunan manusia tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup dan kebebasan individu. Berikut penjelasan dan pembahasan dari beberapa teori pembangunan manusia yang penting:

1. Teori Pembangunan Manusia John G. Hildebrand

Teori pembangunan manusia yang dikemukakan oleh John G. Hildebrand (1995). Hildebrand berpendapat bahwa pembangunan tidak dapat hanya diukur melalui indikator ekonomi seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi kualitas hidup individu. Dalam pandangannya, fokus utama pembangunan manusia adalah pada peningkatan kapabilitas individu serta menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Hildebrand mengidentifikasi beberapa elemen kunci dalam teori pembangunan manusia, termasuk pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan keadilan sosial. Pendidikan dianggap sebagai fondasi penting dalam pembangunan manusia, karena memberikan individu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara produktif dalam masyarakat.

Kesehatan juga merupakan aspek krusial, karena individu yang sehat lebih mampu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Selain itu, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses politik dianggap penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dihargai. Keadilan sosial adalah

prinsip dasar dalam pembangunan manusia. Hildebrand menekankan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan cara yang adil dan inklusif, di mana semua individu, terutama yang terpinggirkan, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan. Upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi harus menjadi bagian integral dari setiap strategi pembangunan.

Modal manusia berkontribusi pada pengembangan ekonomi sama seperti modal fisik atau sumber daya alam. Modal manusia mulai berkembang dalam keluarga dan mencakup tingkat nutrisi, harapan hidup, keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan sikap. Pengembangan modal manusia berkontribusi pada output ekonomi individu di masa depan.

Sejarah menunjukkan bahwa lebih banyak sumber daya dialokasikan untuk pendidikan laki-laki dibandingkan perempuan. Investasi dalam pendidikan perempuan dapat menghasilkan pengembalian sosial dan ekonomi yang signifikan. Ada argumen kuat untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan pendidikan dan dukungan kesehatan yang memadai. Investasi tambahan dalam pendidikan dan kesehatan perempuan diharapkan dapat menghasilkan pengembalian yang diperlukan oleh masyarakat.

Salah satu kontribusi dari Hildebrand adalah penekanan pada pentingnya konteks lokal dalam pembangunan. Hildebrand berargumen bahwa setiap masyarakat memiliki nilai-nilai, norma, dan tradisi yang unik, yang harus dihormati dan dipertimbangkan dalam merancang kebijakan pembangunan. Dengan demikian, pendekatan pembangunan manusia tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh dunia, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menuntut para pembuat kebijakan untuk terlibat dalam dialog dengan masyarakat dan memahami aspirasi serta tantangan yang mereka hadapi. Hildebrand juga menyoroti pentingnya keberlanjutan dalam pembangunan manusia. Ia berpendapat bahwa pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Dalam konteks ini, pembangunan manusia tidak hanya berfokus

pada peningkatan kesejahteraan saat ini, tetapi juga harus memastikan bahwa generasi mendatang memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk hidup yang layak. Keberlanjutan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Hildebrand menekankan bahwa pembangunan manusia harus melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kerjasama ini penting untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Hildebrand juga menggarisbawahi pentingnya inovasi dan teknologi dalam mendukung pembangunan manusia. Dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, masyarakat dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan informasi, yang pada gilirannya dapat memperkuat kapabilitas individu.

Secara keseluruhan, teori pembangunan manusia oleh Hildebrand memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan mengukur pembangunan. Dengan menekankan pentingnya kapabilitas individu, konteks lokal, keberlanjutan, dan inklusivitas, teori ini menawarkan panduan bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam merancang program dan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Teori ini juga mengajak kita untuk terus mengeksplorasi cara-cara baru untuk meningkatkan pembangunan manusia di seluruh dunia, dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada.

Dengan demikian, teori Hildebrand tidak hanya memberikan wawasan tentang bagaimana pembangunan manusia dapat dicapai, tetapi juga menginspirasi tindakan kolektif untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Pendekatan ini mendorong kita untuk berpikir secara kritis dan kreatif dalam menghadapi tantangan pembangunan, serta untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan dalam setiap upaya pembangunan. Dengan menggabungkan pemikiran Hildebrand dan Sen, kita dapat membangun pemahaman yang lebih holistik tentang pembangunan manusia, yang tidak hanya

berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan kebebasan individu di seluruh dunia.

2. Teori Pembangunan Manusia Amartya Sen

Menurut Sen (1999), mengemukakan pendekatan pembangunan manusia yang dikenal sebagai *Capability Approach* atau Pendekatan Kapabilitas. Dalam pandangan ini, pembangunan tidak semata-mata dilihat dari pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan per kapita, melainkan dari sejauh mana individu memiliki kebebasan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Pendekatan ini menekankan dua konsep utama, yaitu *functionings* dan *capabilities*. *Functionings* adalah pencapaian nyata seperti sehat, berpendidikan, atau hidup bermartabat. Sementara itu, *capabilities* merujuk pada kebebasan seseorang untuk memilih dan mewujudkan *functionings* tersebut.

Pembangunan manusia sebagai konsep mulai mendapatkan perhatian global pada akhir abad ke-20. Sebelum itu, fokus utama dalam pembangunan sering kali terletak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produk domestik bruto (PDB) sebagai indikator kemajuan. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kualitas hidup dan kesejahteraan individu, muncul kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih holistik. Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf asal India, memainkan peran kunci dalam mengubah paradigma ini.

Dalam buku *Development as Freedom* (1999), Sen mengemukakan bahwa pembangunan harus dilihat sebagai proses yang memperluas kebebasan individu untuk memilih dan mencapai tujuan hidup mereka. Ia berargumen bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan dan sebaliknya, pembangunan manusia harus mencakup peningkatan kapabilitas individu dalam berbagai aspek kehidupan. Konsep kapabilitas adalah inti dari teori pembangunan manusia Sen. Kapabilitas merujuk pada kemampuan individu untuk melakukan berbagai tindakan yang mereka nilai penting dalam hidup mereka, mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sen

menekankan bahwa pembangunan manusia harus memperhatikan dimensi-dimensi ini, bukan hanya fokus pada angka-angka ekonomi.

Dalam pandangannya, pembangunan manusia tidak hanya tentang meningkatkan pendapatan, tetapi juga tentang memberikan individu alat dan kesempatan untuk menjalani hidup yang mereka inginkan. Sen mengidentifikasi beberapa dimensi penting dalam pembangunan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan partisipasi. Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk berfungsi secara optimal dalam masyarakat, sementara pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara produktif. Pendapatan yang memadai memungkinkan akses terhadap kebutuhan dasar, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan memastikan bahwa suara individu didengar dan dihargai.

Sebagai bagian dari upaya untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia, Sen berkontribusi dalam pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperkenalkan oleh UNDP (1990). IPM menggabungkan tiga dimensi utama: kesehatan yang diukur dengan harapan hidup saat lahir, pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta pendapatan yang diukur dengan Gross National Income (GNI) per kapita. IPM memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemajuan pembangunan dibandingkan dengan hanya mengandalkan PDB. Dengan menggunakan IPM, negara-negara dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. IPM juga memungkinkan perbandingan antara negara-negara dan memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan tertentu dapat mempengaruhi pembangunan manusia.

Meskipun, teori pembangunan manusia oleh Sen telah mendapatkan pengakuan luas, beberapa kritik juga muncul. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pendekatan ini mungkin terlalu idealis dan sulit diimplementasikan dalam praktik. Mereka berargumen bahwa dalam konteks negara-negara berkembang, tantangan struktural seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan korupsi dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kapabilitas individu. Namun, banyak yang sepakat bahwa teori

ini telah membuka jalan bagi pemikiran baru dalam pembangunan, dengan menekankan pentingnya aspek sosial dan kultural dalam proses pembangunan. Sen juga menekankan bahwa pembangunan manusia harus bersifat inklusif, di mana semua individu, terutama yang terpinggirkan, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Sejak saat itu, banyak negara dan organisasi internasional telah mengadopsi pendekatan pembangunan manusia dalam kebijakan dan program mereka. Konsep ini terus berkembang, dengan penekanan pada keberlanjutan, keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, banyak program pembangunan sekarang berfokus pada pemberdayaan perempuan, pengurangan ketidaksetaraan, dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana berbagai faktor saling terkait dan mempengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat.

Sen juga menyoroti pentingnya konteks sosial dan budaya dalam pembangunan manusia. Sen berargumen bahwa setiap masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang unik, yang harus dihormati dan dipertimbangkan dalam merancang kebijakan pembangunan. Dengan demikian, pendekatan pembangunan manusia tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh dunia, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menuntut para pembuat kebijakan untuk terlibat dalam dialog dengan masyarakat dan memahami aspirasi serta tantangan yang mereka hadapi.

Dalam konteks global yang terus berubah, pemikiran Sen tetap relevan, mendorong kita untuk mempertimbangkan bagaimana kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua. Teori ini mengajak kita untuk melihat pembangunan sebagai proses yang melibatkan semua lapisan masyarakat, di mana setiap individu memiliki hak untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Sen juga menekankan bahwa pembangunan manusia harus mencakup upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi, serta

memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya.

Menurut para ahli lain yang mengacu pada pemikiran Sen, seperti Nussbaum et al., (2011), kapabilitas juga mencakup dimensi moral dan etika, di mana individu tidak hanya memiliki kebebasan untuk memilih, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kebebasan tersebut dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Nussbaum mengembangkan daftar sepuluh kapabilitas dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai kehidupan yang layak, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pendekatan ini memperkuat argumen Sen bahwa pembangunan manusia harus bersifat holistik dan inklusif.

Secara keseluruhan, teori pembangunan manusia oleh Amartya Sen telah mengubah cara kita memahami pembangunan. Dengan menekankan pentingnya kapabilitas individu dan kualitas hidup, Sen telah memberikan kerangka kerja yang lebih holistik untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan dan kebebasan individu, yang merupakan tujuan utama dari pembangunan itu sendiri. Dalam konteks ini, pembangunan manusia menjadi suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu. Dengan demikian, teori Sen tidak hanya memberikan panduan bagi kebijakan pembangunan, tetapi juga menginspirasi gerakan sosial yang berupaya untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.

Lebih jauh lagi, Sen mengingatkan kita bahwa pembangunan manusia tidak dapat dipisahkan dari isu-isu global seperti perubahan iklim, migrasi, dan ketidakstabilan politik. Dalam dunia yang semakin terhubung, tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang kolaboratif dan lintas batas. Sen berpendapat bahwa negara-negara harus bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah ini, dengan mengutamakan kesejahteraan manusia di atas kepentingan ekonomi semata.

Dengan demikian, teori pembangunan manusia oleh Sen tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga dalam konteks global, mendorong kita untuk berpikir secara kritis tentang bagaimana kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang.

Dengan semua pemikiran ini, teori pembangunan manusia oleh Amartya Sen tetap menjadi landasan penting dalam diskusi tentang pembangunan dan kesejahteraan, mengajak kita untuk terus mengeksplorasi cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas hidup dan kebebasan individu di seluruh dunia.

Dalam praktiknya, teori Sen kemudian diadopsi oleh *United Nations Development Program* UNDP (2020) dalam menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). HDI mengukur tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan sehat yang diukur dari harapan hidup saat lahir, akses terhadap pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan standar hidup layak yang diukur melalui pendapatan nasional bruto per kapita.

Setiap dimensi tersebut dihitung melalui normalisasi nilai aktual terhadap nilai minimum dan maksimum menggunakan rumus:

$$\text{Indeks Dimensi} = \frac{\text{Nilai aktual} - \text{Minimum}}{\text{Maksimum} - \text{Minimum}}$$

$$\text{Indeks Dimensi} = \frac{\text{Nilai aktual} - \text{Minimum}}{\text{Maksimum} - \text{Minimum}}$$

$$\text{Indeks Dimensi} = \frac{\text{Maksimum} - \text{Minimum}}{\text{Nilai aktual} - \text{Minimum}}$$

Kemudian, HDI ditentukan dengan rata-rata geometrik dari ketiga indeks dimensi tersebut:

$$\text{HDI} = (\text{Indeks Kesehatan} \times \text{Indeks Pendidikan} \times \text{Indeks Pendapatan})^{1/3}$$

$$\text{HDI} = (\text{Indeks Kesehatan} \times \text{Indeks Pendidikan} \times \text{Indeks Pendapatan})^{1/3}$$

$$\text{HDI} = (\text{Indeks Kesehatan} \times \text{Indeks Pendidikan} \times \text{Indeks Pendapatan})^{1/3}$$

(Sen 1999).

3. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan mulai muncul pada akhir abad ke-20, seiring dengan meningkatnya kesadaran global mengenai dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak terencana terhadap lingkungan dan masyarakat. Istilah "pembangunan berkelanjutan" diperkenalkan dalam laporan yang disusun oleh (WCED) *World Commission on Environment and Development* yang dipimpin oleh Gro Harlem Brundtland, yang dikenal sebagai Laporan Brundtland, yang diterbitkan pada tahun 1987. Dalam laporan tersebut, Brundtland mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka." Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan (Brundtland 1987).

Sejak saat itu, berbagai konferensi internasional, seperti KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992, semakin memperkuat agenda pembangunan berkelanjutan. Konferensi tersebut menghasilkan Agenda 21, yang merupakan rencana aksi global untuk pembangunan berkelanjutan dan mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2000, tujuan-tujuan pembangunan milenium. *Millenium Development Goal Sustainable* (MDGs) diperkenalkan, yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Kemudian, pada tahun 2015, MDGs digantikan oleh *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang menetapkan 17 tujuan untuk dicapai pada tahun 2030, termasuk pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan (United Nations 2015). Berikut beberapa poin penting dari laporan Brundtland (1987):

1. Keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan, Laporan ini menekankan bahwa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, ketiga aspek ini harus seimbang dan saling mendukung.
2. Pentingnya kerjasama internasional, Tantangan yang dihadapi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan bersifat global dan memerlukan kolaborasi antara negara-negara.

3. Keterkaitan antara pembangunan dan lingkungan, Pembangunan tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, yang merupakan sumber daya vital bagi kehidupan manusia.

Selanjutnya, dalam bukunya "*The Age of Sustainable Development*," Sachs (2015) menjelaskan tantangan dan peluang yang dihadapi dunia dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Sachs mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga mencakup aspek ekonomi dan sosial. Ia menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan. Buku ini memberikan analisis mendalam tentang bagaimana negara-negara dapat mengimplementasikan strategi pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada hasil. Berikut beberapa Poin Penting dari Sachs:

1. Pembangunan berkelanjutan sebagai integrasi antara ekonomi, sosial, dan lingkungan, Sachs menekankan bahwa ketiga aspek ini harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan pembangunan.
2. Pentingnya kebijakan inklusif dan berorientasi hasil, Kebijakan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan berfokus pada hasil yang nyata sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Analisis tentang bagaimana negara dapat mengimplementasikan strategi pembangunan berkelanjutan, Sachs memberikan panduan praktis bagi negara-negara untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses yang kompleks dan dinamis, yang memerlukan komitmen dan tindakan nyata dari semua pihak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga tentang memastikan bahwa generasi mendatang memiliki sumber daya dan lingkungan yang sehat untuk hidup dan berkembang. Analisis terhadap pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa

keberhasilan konsep ini sangat bergantung pada kerjasama internasional dan komitmen dari semua pemangku kepentingan. Banyak tantangan yang dihadapi bersifat global dan tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Oleh karena itu, kolaborasi antara negara, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan juga memerlukan pendekatan yang holistik dan integratif. Hal ini berarti bahwa semua aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, harus dipertimbangkan dalam setiap kebijakan pembangunan. Misalnya, pendidikan yang berkualitas dapat memberdayakan individu untuk keluar dari kemiskinan, sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan dan kesehatan menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, meskipun ada kemajuan dalam penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang dalam hal akses terhadap sumber daya dan teknologi, serta perbedaan dalam kapasitas institusi, sering kali menghambat upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Selain itu, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang terus berlanjut menambah kompleksitas masalah yang harus diatasi.

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses yang memerlukan komitmen dan tindakan nyata dari semua pihak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga tentang memastikan bahwa generasi mendatang memiliki sumber daya dan lingkungan yang sehat untuk hidup dan berkembang. Melalui kolaborasi dan pendekatan yang inklusif, kita dapat mengatasi tantangan yang ada dan mewujudkan dunia yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi semua.

2.1.1.2 Konsep Pembangunan Manusia

Menurut *United National Development Program* Pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan (UNDP 2020). Proses ini mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi yang memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan produktif. Pembangunan manusia tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, melainkan juga melibatkan aspek sosial dan psikologis yang mendukung terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan Sen (1999). Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan manusia menjadi kunci utama karena kualitas sumber daya manusia sangat menentukan kemajuan dan kesejahteraan suatu negara (UNDP 2019).

Pentingnya pembangunan manusia diakui secara global sebagai fondasi utama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas individu dan masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, serta kesempatan kerja yang adil, menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Dengan demikian, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa kebijakan dan alokasi anggaran mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata (Nussbaum et al. (2011). Hildebrand (1995 hlm 63) menyatakan bahwa pembangunan manusia tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga meliputi kesehatan, pendidikan, dan kesempatan sosial yang memungkinkan individu untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal.

Menurut laporan dari *Human Development and the Anthropocene Human Development Report* (2020 hlm 47) pembangunan manusia diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup tiga dimensi utama yaitu umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), akses terhadap (pendidikan) yang layak, serta (standar hidup) yang memadai. Damayanti et al. (2023) juga mengungkapkan

bahwa pembangunan manusia dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, khususnya dalam alokasi pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran di sektor pendidikan terbukti berpengaruh positif terhadap peningkatan IPM, mencerminkan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.1.1.3 Pengertian Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan konsep yang luas dan multidimensional, yang mencakup peningkatan kualitas hidup individu dan masyarakat. Menurut UNDP (2020), pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki individu, di mana ukuran keberhasilan tidak hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi melainkan juga peningkatan kesehatan, pendidikan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik (UNDP 1990).

Sementara itu, World Bank menekankan bahwa pembangunan manusia berkaitan dengan peningkatan kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial, serta menyoroti pentingnya investasi dalam pendidikan dan kesehatan sebagai kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat (Islam 2002).

Sejalan dengan itu, Amartya Sen memandang pembangunan manusia sebagai proses peningkatan kapabilitas individu, yakni pemberian kebebasan kepada manusia untuk memilih dan mencapai tujuan hidup mereka (Sen 1999). Nussbaum et al. (2011) yang turut mengembangkan teori kapabilitas Bersama. Sen (1999) menambahkan bahwa pembangunan manusia harus menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan partisipasi sosial, serta menegaskan hak setiap individu untuk mengembangkan kapabilitasnya demi kehidupan yang bermakna (Nussbaum et al. 2011). Di Indonesia, Badan Pusat Statistik BPS (2015) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.

2.1.1.4 Faktor-faktor Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan memengaruhi kualitas hidup individu serta masyarakat secara keseluruhan yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi mencakup pendapatan, kesempatan kerja, dan distribusi pendapatan. Pendapatan yang memadai dan pemerataan distribusi pendapatan sangat penting untuk memastikan akses yang lebih luas terhadap kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, kesempatan kerja yang adil memungkinkan individu untuk berkontribusi secara produktif dalam perekonomian dan meningkatkan taraf hidupnya (Stiglitz 2012).

2. Faktor Sosial

Meliputi pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial. Pendidikan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan individu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Kesehatan yang baik memungkinkan individu berfungsi secara optimal dalam berbagai aktivitasnya, sementara lingkungan sosial yang supportif memberikan dukungan dan memperkuat kohesi sosial (Sen 1999).

3. Faktor Politik

Berkaitan dengan kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan partisipasi politik. Kebebasan sipil dan politik memberikan ruang bagi individu untuk mengemukakan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik yang berdampak pada kualitas pembangunan manusia. Hak asasi manusia yang terjaga memastikan perlindungan setiap individu dalam proses pembangunan (Donnelly 2013).

4. Faktor Lingkungan

Mencakup kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Lingkungan yang sehat dan sumber daya alam yang dikelola dengan baik mendukung kesehatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang (Costanza et al. 2023).

2.1.1.5 Indikator Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (2020) indikator pembangunan manusia adalah alat kuantitatif yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat. Indikator-indikator ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta standar hidup yang layak. Beberapa indikator utama dalam pembangunan manusia dan cara menghitung ipm antara lain:

1. Rata Rata Lama Sekolah

Menurut UNDP (2020), Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat pendidikan masyarakat. Indikator ini menunjukkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah dijalani oleh penduduk dalam suatu wilayah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin baik pula kualitas pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Pendidikan yang baik berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan individu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar kerja. Selain itu, menurut Sen (1999) pendidikan juga berperan dalam memperluas pilihan hidup individu, sehingga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

2. Kualitas Hidup Masyarakat

Kualitas hidup masyarakat mencakup berbagai aspek, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Indikator ini mencerminkan sejauh mana individu dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan yang memadai, dan lingkungan yang bersih. Kualitas hidup yang baik berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental masyarakat, serta meningkatkan kepuasan hidup secara keseluruhan. UNDP (2020) menekankan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah tujuan utama dari pembangunan manusia, yang harus dicapai melalui kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, menurut Nussbaum (2011), kualitas hidup yang baik juga berkaitan dengan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan berkontribusi pada masyarakat.

3. Standar Hidup Layak

Baharudin Akbar, 2025

PENGARUH ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA PERIODE 2016-2023

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Standar hidup layak merupakan indikator yang mengukur sejauh mana individu dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan akses terhadap layanan dasar lainnya. Standar hidup yang layak mencerminkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Ketika standar hidup meningkat, masyarakat cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Menurut UNDP (2020), pencapaian standar hidup yang layak adalah salah satu tujuan utama dalam pembangunan manusia, yang harus didukung oleh kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Sen (1999) juga menekankan pentingnya standar hidup yang layak dalam menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan di masyarakat.

Berikut cara menghitung penjelasan komprehensif mengenai indikator pengukuran ipm:

1. Indikator Metodologi Perhitungan IPM)

Rumus dan prosedur kalkulasi ipm dan menghitung indeks komponen terdiri dari 3 dimensi yaitu ;

- a. Indeks Pendidikan (*Rata Rata Lama Sekolah*)

Pengukuran rata-rata tahun pendidikan penduduk usia 25+ tahun.dengan rumus:

$$IP = \frac{1}{2} \left(\frac{RataRataLamaSekolah(RLS)}{15} \right) + \left(\frac{HarapanLamaSekolah(RLS)}{18} \right)$$

(Barro & Lee, 2013).

Mencerminkan akumulasi pengetahuan dan keterampilan yang mendukung produktivitas ekonomi dan partisipasi sosial (Barro & Lee 2013).

- b. Indeks Kesehatan (*Angka Harapan Hidup*)

Pengukuran angka harapan hidup menggunakan rumus:

$$IK = \frac{Harapan Hidup - 20}{15 - 20}$$

Batas

Minimum = 20 tahun, Maksimum = 85 tahun

Harapan hidup = 70 tahun

$$IK = \frac{70 - 20}{65} = 76$$

(UNDP 2020).

Baharudin Akbar, 2025

PENGARUH ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA PERIODE 2016-2023

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Indeks Kesehatan yang dihitung dari Angka Harapan Hidup memberikan informasi yang penting tentang kesehatan populasi. Dengan menggunakan IK, dapat memahami lebih baik tantangan kesehatan yang dihadapi dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (UNDP 2020).

c. Indeks Pendapatan (*Standar Hidup Layak*)

Pendapatan Per Kapita Pengukuran dihitung berdasarkan Gross National Income (GNI) per kapita dengan penyesuaian paritas daya beli (PPP) menggunakan rumus:

$$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{\text{Harapan Hidup} - 20}{85 - 20}$$

$$IP = \frac{\ln(\text{GNI per kapita}) - \ln(100)}{\ln(75000) - \ln(100)}$$

(UNDP 2020).

Keterangan

GNI per kapita menggunakan PPP USD

Contoh

GNI = 23,500

Mencerminkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan) dan akses terhadap layanan esensial. Pendapatan yang memadai berkorelasi dengan peningkatan investasi dalam pendidikan dan kesehatan (UNDP 2020).

2. Indikator Menghitung IPM Akhir

$$IP_d = \frac{\ln(23500) - \ln(100)}{\ln(75000) - \ln(100)} \approx 75$$

$$IPM = \sqrt[3]{IK \times IP \times IP_d}$$

Contoh

IK = 76, IP = 67, IPM = 75

$$IPM = \sqrt[3]{76 \times 67 \times 75} \approx 72$$

(UNDP 2020).

3. Kategori IPM

Kategori	Skor IPM
Sangat Tinggi	≥ 80

Bararudin Akbar, 2025

PENGARUH ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA PERIODE 2016-2023

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tinggi	70 – 79
Sedang	60 – 69
Rendah	< 60

(UNDP 2020).

2.1.1.6 Ciri-ciri Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah proses yang kompleks dan multidimensional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut UNDP (1990), ada beberapa ciri-ciri pembangunan manusia yang dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Hidup Secara Menyeluruhan

Pembangunan manusia tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi mencakup peningkatan multidimensi meliputi kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, dan kualitas lingkungan. Menurut Sen, (1999) pendekatan ini mengubah paradigma dari pertumbuhan pendapatan menjadi pengembangan kapabilitas untuk hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih produktif. Contohnya, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia meningkatkan akses kesehatan 68% penduduk dan mengurangi beban biaya kesehatan rumah tangga sebesar 15%. (Kemenkes 2022).

2. Penyediaan Kesempatan yang Adil dan Merata

Ciri ini menekankan penghapusan ketimpangan struktural berbasis gender, geografi, atau status sosial. UNDP (2020) menyatakan bahwa pembangunan manusia harus menjamin akses setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi. Studi di NTT menunjukkan bahwa program beasiswa afirmasi meningkatkan partisipasi sekolah perempuan miskin sebesar 23% (Bappenas 2021).

3. Menurut UNDP (2020), pemberdayaan individu untuk meningkatkan kesejahteraan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan manusia. Pembangunan manusia bertujuan untuk membentuk agen perubahan yang aktif melalui:

Baharudin Akbar, 2025

PENGARUH ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA PERIODE 2016-2023

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. Pendidikan transformatif yang mengembangkan keterampilan kritis
- b. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan
- c. Akses ke pasar kerja yang inklusif

Penelitian Nussbaum (2011), membuktikan bahwa pemberdayaan perempuan melalui kredit mikro meningkatkan pendapatan keluarga 40% sekaligus menurunkan kekerasan domestik 32%.

4. Perubahan Positif Berkelanjutan

- a. Ekonomi pertumbuhan inklusif yang mengurangi kemiskinan
- b. Sosial dengan penguatan kohesi komunitas dan ketahanan budaya
- c. Lingkungan pengelolaan SDA berkelanjutan

Laporan BPS (2022), mencatat desa dengan program eco-village di Bali mengalami kenaikan IPM 12% lebih tinggi daripada desa non-partisipan.

2.1.1.7 Jenis-jenis Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (2010) Pembangunan Manusia adalah konsep multidimensi yang luas yang mencakup berbagai aspek yang berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Jenis perkembangan manusia dapat dibedakan berdasarkan fokus dan pendekatan. Beberapa jenis perkembangan manusia yaitu:

2. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi berfokus pada peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ini mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Menurut Todaro & Smith (2015), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus menciptakan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses ekonomi.

Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga pada bagaimana pertumbuhan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (World Bank 2013). Misalnya, program-program yang mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. UKM sering

kali menjadi tulang punggung ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan produk serta layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat (Acemoglu & Robinson, 2012).

Investasi dalam infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik, juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa World Bank (2013). Infrastruktur yang baik memungkinkan mobilitas yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Pentingnya pembangunan ekonomi juga terlihat dalam upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang dan menciptakan ketidakstabilan sosial (Stiglitz, 2012).

Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong redistribusi kekayaan, seperti pajak progresif dan program bantuan sosial, menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi. Menurut Piketty (2014), Redistribusi kekayaan tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan, tetapi juga meningkatkan stabilitas sosial dan politik, yang merupakan prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat. Ini mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Menurut Sen (1999), pembangunan sosial adalah tentang memperluas kebebasan individu untuk memilih dan mencapai tujuan hidup mereka. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sosial. Akses yang lebih baik terhadap pendidikan berkualitas memiliki potensi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu. Hal ini, pada gilirannya, dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat (Sari & Hidayati 2021). Program-program pendidikan yang bersifat inklusif, seperti pemberian beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu, berperan penting dalam mengurangi kesenjangan pendidikan. Dengan demikian, kesempatan yang lebih adil dapat diberikan kepada semua individu. Selain itu, pendidikan yang

berkualitas juga berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran serta peningkatan daya saing tenaga kerja.

Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan aspek yang sangat penting dalam konteks pembangunan sosial. Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dapat meningkatkan harapan hidup serta kualitas hidup masyarakat (Pratiwi & Rahmawati 2020). Program-program kesehatan masyarakat, seperti imunisasi dan pendidikan gizi, berfungsi untuk mengurangi angka kematian dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Kesehatan yang baik tidak hanya berdampak positif pada kualitas hidup individu, tetapi juga berkontribusi pada produktivitas ekonomi. Masyarakat yang sehat cenderung lebih produktif dan memiliki tingkat absensi yang lebih rendah di tempat kerja. Pembangunan sosial juga mencakup penguatan jaringan sosial dan komunitas. Masyarakat yang memiliki jaringan sosial yang kuat cenderung lebih resilien dan mampu menghadapi berbagai tantangan (Wulandari & Setiawan 2022).

Oleh karena itu, program-program yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta pengembangan komunitas sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial mereka, yang pada gilirannya dapat memperkuat kohesi sosial dan stabilitas.

4. Pembangunan Lingkungan

Pembangunan lingkungan berfokus pada keberlanjutan dan perlindungan sumber daya alam. Ini mencakup upaya untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan, seperti pencemaran dan deforestasi. Menurut Brundtland (1987) pembangunan yang berkelanjutan harus memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan lingkungan yang berkelanjutan melibatkan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Ini termasuk praktik-praktik seperti pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, dan penggunaan energi terbarukan. Misalnya, program

reboisasi dapat membantu memulihkan ekosistem yang rusak dan meningkatkan kualitas udara, sementara penggunaan energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca (Costanza et al. 2023).

Pendidikan lingkungan juga merupakan bagian penting dari pembangunan lingkungan. Masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan cenderung lebih berkomitmen untuk melindungi sumber daya alam. Program-program pendidikan lingkungan yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan konservasi dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan (Dreze et al. 1999). Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang efektif dalam perlindungan lingkungan (World Bank 2013).

5. Pembangunan Kultural

Pembangunan kultural berfokus pada pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Ini mencakup pengakuan terhadap keberagaman budaya dan upaya untuk melestarikan warisan budaya. Menurut UNESCO (2001), pembangunan kultural adalah tentang menciptakan ruang bagi ekspresi budaya dan identitas masyarakat. Pembangunan kultural sangat penting untuk menjaga keberagaman budaya di tengah globalisasi yang semakin meningkat. Program-program yang mendukung seni dan budaya lokal, seperti festival budaya dan pelatihan seni, dapat membantu memperkuat identitas budaya masyarakat (Sari 2021). Selain itu, pelestarian situs-situs bersejarah dan tradisi lokal juga merupakan bagian penting dari pembangunan kultural. Melalui pelestarian budaya, masyarakat dapat menjaga warisan mereka dan mentransfer nilai-nilai budaya kepada generasi mendatang (Prananda et al. 2022).

Pembangunan kultural juga dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Sektor pariwisata yang berbasis budaya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Mongan 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan aspek kultural dalam perencanaan pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan

mempromosikan budaya lokal, masyarakat tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat rasa kebanggaan dan identitas mereka.

6. Pembangunan Manusia Berbasis Hak

Pembangunan manusia berbasis hak menekankan pentingnya hak asasi manusia dalam proses pembangunan. Hal ini mencakup pengakuan dan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Menurut UNDP (2000), pembangunan manusia harus berfokus pada pemberdayaan individu dan penghapusan ketidakadilan. Pembangunan berbasis hak menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mencapai potensi mereka. Upaya untuk mengatasi diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti perempuan, anak-anak, dan minoritas, menjadi sangat penting. Program-program yang mendukung akses pendidikan bagi anak-anak dari kelompok marginal dan rentan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang (Sukirno 2000).

Selain itu, pembangunan manusia berbasis hak juga mencakup partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan cenderung memiliki rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang diambil dan lebih mungkin untuk mendukung implementasinya.

Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan (Mudrajad 2013).

7. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pembangunan. Pendekatan ini mencakup upaya untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Menurut laporan Brundtland (1987), pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan

generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka".

Pembangunan berkelanjutan melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan harus mencakup pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan peningkatan efisiensi energi. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan juga sangat penting untuk mencapai tujuan ini (Sari 2021).

Contoh dari pembangunan berkelanjutan adalah inisiatif energi terbarukan yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Program-program yang mendukung pertanian berkelanjutan juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan dan melindungi lingkungan. Dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, pembangunan berkelanjutan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan (Prananda et al. 2022).

2.1.1.8 Hubungan Ipm Terhadap Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan

Pembangunan manusia merupakan suatu proses yang kompleks dan multidimensional dimana berbagai dimensi kehidupan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, saling berinteraksi untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan (UNDP 2020). Dalam konteks pembangunan nasional, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan menjadi instrumen penting yang berperan strategis sebagai modal utama dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini dipertegas oleh Hildebrand (1995) yang menegaskan bahwa investasi dalam modal manusia melalui pendidikan dan kesehatan mempengaruhi produktivitas individu dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang secara signifikan. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran yang optimal pada kedua sektor ini merupakan pilar utama keberhasilan pembangunan manusia.

Anggaran pendidikan berfungsi sebagai sumber pembiayaan yang mendukung peningkatan akses dan mutu pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi (Arifi et al. 2018). Pendidikan memegang peranan sentral dalam mengembangkan kapasitas intelektual, keterampilan, dan nilai-nilai sosial yang penting agar individu dapat berperan secara efektif dalam masyarakat dan dunia kerja (Tanjung Sari 2022).

Dengan adanya anggaran yang dialokasikan secara memadai untuk sektor pendidikan, maka kesempatan belajar yang layak dapat diperluas sehingga mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi, dan hasil belajar yang lebih baik. Indikator tersebut pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan kualitas modal manusia dan secara tidak langsung berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Mongan 2019). Sebagai contoh, semakin tinggi alokasi anggaran pendidikan, semakin besar pula kemungkinan pemerintah dapat menyediakan fasilitas belajar yang memadai, pelatihan guru yang berkualitas, dan program-program yang menyasar kelompok masyarakat kurang mampu, sehingga mengurangi kesenjangan pendidikan yang selama ini menjadi masalah dalam pembangunan manusia. Sementara itu, anggaran kesehatan adalah pilar penting yang tidak kalah strategis. Pengalokasian dana yang memadai pada sektor kesehatan memungkinkan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, distribusi tenaga medis, serta program pencegahan dan pengobatan penyakit (Sachs 2015).

Anggaran kesehatan secara langsung mempengaruhi indikator kesehatan masyarakat seperti angka harapan hidup, angka kematian bayi, dan tingkat penyakit menular serta tidak menular (WHO 2010). Dengan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik dan akses yang merata, individu akan memiliki kondisi fisik yang sehat sehingga mampu berproduktivitas secara optimal dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan (Tim Penyusun Pusat Kajian Anggaran (DPR RI 2016).

Oleh karena itu, anggaran kesehatan merupakan investasi jangka panjang yang pada gilirannya memperkuat modal manusia sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial. Anggaran yang teralokasi dengan tepat tidak hanya

meningkatkan kualitas hidup secara individu, melainkan juga menurunkan biaya sosial ekonomi akibat penyakit yang berkepanjangan dan ketidakhadiran tenaga kerja produktif di masyarakat.

Hubungan yang erat antara pembangunan manusia dengan anggaran pendidikan dan kesehatan telah banyak dibuktikan secara empiris dalam berbagai penelitian. Studi oleh Alfred Cyprain Bognet (2023) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama memiliki efek positif yang signifikan terhadap pengembangan modal manusia. Begitu pula penelitian Kousar et al. (2023) menemukan bahwa investasi pemerintah di kedua sektor ini saling melengkapi dan berkontribusi pada peningkatan pencapaian pendidikan dan harapan hidup, sekaligus menurunkan angka kematian anak. Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan sebaiknya tidak dipandang terpisah, melainkan sebagai kesatuan investasi terintegrasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia.

Dari sisi teori, Amartya Sen (1999) melalui pendekatan kapabilitas menekankan bahwa pembangunan manusia bukan hanya sekedar peningkatan pendapatan semata tetapi merupakan perluasan kebebasan yang memungkinkan individu untuk hidup produktif dan bermakna. Dalam hal ini, anggaran pendidikan dan kesehatan menjadi instrumen pemerataan peluang hidup tersebut. Pendidikan membuka akses untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, sementara kesehatan memastikan individu memiliki kondisi fisik dan mental yang memadai untuk memanfaatkan peluang tersebut. Dengan demikian, anggaran yang memadai dan digunakan secara efektif pada kedua sektor ini memperkuat kapabilitas individu, sehingga mendorong pembangunan manusia yang berkelanjutan dan inklusif (Nussbaum et al. 2011 & Sen 1999).

Selain itu, teori *Human Capital* yang diuraikan oleh Hildebrand (1995) melengkapi pemahaman tersebut dengan menegaskan pentingnya investasi pemerintah dalam pendidikan dan kesehatan sebagai modal yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Investasi tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi saja, tetapi juga pada dimensi sosial

dan budaya yang menunjang kemampuan individu beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan sosialnya. Hildebrand juga menekankan pentingnya memperhatikan konteks lokal dan keberlanjutan dalam mengelola anggaran pendidikan dan kesehatan agar hasil pembangunan manusia dapat dirasakan merata dan berjangka panjang.

Keberhasilan pembangunan manusia yang ditunjukkan melalui indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat bergantung pada kualitas alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan. Secara empiris, jika alokasi anggaran keduanya optimal, maka IPM cenderung meningkat, mencerminkan peningkatan angka harapan hidup, lamanya pendidikan, dan standar hidup yang lebih baik (UNDP (2020). Namun, penting untuk dicatat bahwa selain jumlah anggaran, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana sangat menentukan hasil pembangunan. Sebagai contoh, alokasi anggaran yang tidak didukung dengan tata kelola yang baik dan transparansi dapat menurunkan dampak positif anggaran tersebut (Transparency International 2019).

Kesimpulannya, hubungan positif yang signifikan antara pembangunan manusia dengan anggaran pendidikan dan kesehatan tidak hanya memiliki dasar empiris kuat tetapi juga dikukuhkan *Human Capital* Hildebrand dan pendekatan kapabilitas Amartya Sen. Keduanya menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan adalah fondasi untuk menciptakan sumber daya manusia yang produktif, sehat, dan memiliki kebebasan luas dalam mengambil keputusan hidupnya, sehingga mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.1.2. Anggaran Pendidikan

2.1.2.1 Konsep Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan merupakan komponen krusial dalam perencanaan dan pengelolaan sektor pendidikan, yang bertujuan untuk memastikan akses yang adil dan setara bagi semua individu terhadap pendidikan berkualitas. Di Indonesia, regulasi anggaran pendidikan diatur oleh undang-undang yang mewajibkan alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor

pendidikan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses bagi seluruh masyarakat (Arifi et al. 2018).

Menurut Arifi et al. (2018), anggaran pendidikan yang memadai adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Pendidikan berperan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas pendidikan yang baik berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Tanjung Sari 2022).

Oleh karena itu, perencanaan anggaran pendidikan harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa anggaran pendidikan bukan sekadar angka, tetapi juga mencerminkan prioritas dan nilai-nilai yang dipegang oleh suatu negara. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan anggaran pendidikan adalah keterbatasan sumber daya keuangan. Banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi kesulitan dalam mengalokasikan dana yang cukup untuk pendidikan. Arifi et al. (2018), mencatat bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam alokasi anggaran pendidikan, masih ada kesenjangan antara kebutuhan pendidikan dan dana yang tersedia. Hal ini sering kali mengakibatkan pemotongan anggaran yang berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan aksesibilitas bagi kelompok-kelompok rentan (Pranata 2023).

Selain itu, ketidakpastian ekonomi juga dapat mempengaruhi anggaran pendidikan. Fluktuasi pendapatan pemerintah akibat perubahan kondisi ekonomi dapat menyebabkan pemotongan anggaran yang tidak terduga. Dalam situasi krisis ekonomi, pendidikan sering kali menjadi salah satu sektor yang pertama kali terkena dampak pemotongan anggaran Arifi et al. (2018) menekankan bahwa hal ini dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses bagi semua individu. Korupsi dan penyalahgunaan dana juga menjadi masalah serius dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Dalam beberapa

kasus, dana yang dialokasikan untuk pendidikan tidak digunakan secara efisien atau bahkan disalahgunakan, yang mengakibatkan pemborosan sumber daya. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Tanjung Sari 2022).

Meskipun ada tantangan yang dihadapi, anggaran pendidikan juga memiliki potensi untuk mendorong inovasi dan perbaikan dalam sektor pendidikan. Investasi dalam teknologi pendidikan, misalnya, dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan memperluas akses pendidikan. Penggunaan sistem manajemen data yang baik dapat membantu dalam melacak pengeluaran dan hasil pendidikan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang berbasis data. Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih interaktif dan menarik, yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa.

Kesimpulannya, anggaran pendidikan adalah alat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang adil dan berkualitas. Dengan merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua individu. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, penggunaan teknologi dan pendekatan yang berbasis data dapat membantu mengatasi masalah tersebut dan memastikan bahwa anggaran pendidikan memberikan dampak positif yang signifikan. Dengan komitmen yang kuat terhadap pendidikan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

2.1.2.2 Fungsi Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di suatu negara. Tiga fungsi utama dari anggaran pendidikan adalah fungsi alokatif, distributif, dan stabilisasi. Masing-masing fungsi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik dan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas. Berikut 3 fungsi anggaran pendidikan:

Baharudin Akbar, 2025

PENGARUH ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA PERIODE 2016-2023

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Fungsi Alokatif

Fungsi alokatif dari anggaran pendidikan berkaitan dengan pengalokasian sumber daya keuangan untuk berbagai kegiatan pendidikan. Ini mencakup penentuan berapa banyak dana yang akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan bahan ajar, pelatihan guru, dan program-program pendidikan lainnya. Arifi et al. (2018) menyatakan bahwa alokasi yang tepat dan efisien dari anggaran pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek pendidikan mendapatkan perhatian yang memadai. Dengan alokasi yang tepat, diharapkan dapat tercapai peningkatan kualitas pendidikan dan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah harus melakukan analisis yang mendalam terhadap kebutuhan pendidikan di berbagai daerah. Misalnya, daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi mungkin memerlukan lebih banyak dana untuk program beasiswa dan bantuan pendidikan, sementara daerah yang lebih maju mungkin memerlukan investasi dalam infrastruktur dan teknologi pendidikan.

Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang berbasis data dan analisis kebutuhan sangat penting dalam fungsi alokatif ini. Fungsi alokatif juga mencakup pengambilan keputusan tentang prioritas pengeluaran dalam sektor pendidikan. Dalam konteks ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi ekonomi, dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Alokasi yang baik akan membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan memastikan bahwa dana digunakan untuk kegiatan yang memberikan dampak positif terbesar bagi pendidikan. Misalnya, alokasi dana untuk pelatihan guru dapat meningkatkan kualitas pengajaran, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada hasil belajar siswa.

2. Fungsi Distributif

Fungsi distributif dari anggaran pendidikan berfokus pada distribusi sumber daya pendidikan secara adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan antara

kelompok-kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Arifi et al. (2018) menekankan bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh semua individu, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan dan kurang mampu. Oleh karena itu, anggaran pendidikan harus dirancang untuk memastikan bahwa dana dialokasikan dengan cara yang mendukung pemerataan pendidikan. Fungsi distributif juga mencakup penyediaan beasiswa, bantuan pendidikan, dan program-program khusus yang ditujukan untuk mendukung siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung. Dengan cara ini, diharapkan semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Misalnya, program beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dapat membantu mereka mengakses pendidikan di sekolah-sekolah yang lebih baik.

Selain itu, fungsi distributif juga mencakup upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Ini dapat dilakukan melalui program-program yang melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan, seperti program pengembangan masyarakat yang mendukung pendidikan anak-anak. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan dan dukungan yang lebih besar terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan.

3. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi dari anggaran pendidikan berkaitan dengan peran anggaran dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi melalui pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pengembangan masyarakat yang lebih baik. Arifi et al. (2018) menyatakan bahwa anggaran pendidikan yang memadai dapat membantu menciptakan stabilitas sosial dengan memberikan kesempatan kepada individu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pendidikan. Fungsi stabilisasi juga mencakup respons terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial. Dalam situasi krisis, misalnya, anggaran pendidikan dapat digunakan untuk mendukung program-program yang membantu masyarakat beradaptasi dengan

perubahan tersebut. Ini termasuk pelatihan keterampilan baru bagi tenaga kerja yang terdampak oleh perubahan industri atau ekonomi. Dengan memberikan pendidikan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar, anggaran pendidikan dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih adaptif dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Lebih jauh lagi, fungsi stabilisasi juga dapat dilihat dalam konteks pencegahan konflik sosial. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas dapat mengurangi ketegangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Dengan memberikan akses pendidikan yang setara kepada semua individu, anggaran pendidikan dapat berkontribusi pada pengurangan ketidakpuasan sosial yang sering kali menjadi pemicu konflik.

Secara keseluruhan, fungsi alokatif, distributif, dan stabilisasi dari anggaran pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang adil dan berkualitas. Dengan merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua individu. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, pemahaman yang baik tentang fungsi-fungsi ini dapat membantu dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat terhadap pendidikan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

2.1.2.3 Tujuan Anggaran Pendidikan

Tujuan utama dari anggaran pendidikan adalah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan setara terhadap pendidikan berkualitas. Menurut Arifi et al. (2018), anggaran pendidikan dirancang untuk mencapai beberapa tujuan spesifik, antara lain:

1. Peningkatan Akses Pendidikan

Memastikan bahwa semua anak, terutama dari kelompok rentan, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Ini termasuk penyediaan beasiswa, bantuan pendidikan, dan program-program yang mendukung partisipasi siswa.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Baharudin Akbar, 2025

PENGARUH ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA PERIODE 2016-2023

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Mengalokasikan dana untuk pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pengadaan bahan ajar yang berkualitas. Menurut World Bank (2018), peningkatan kualitas pendidikan adalah kunci untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik.

3. Pengurangan Kesenjangan dalam Pendidikan

Mengatasi disparitas dalam akses dan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pendidikan di daerah tersebut.

Dengan merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif, diharapkan anggaran pendidikan dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih luas.

2.1.2.4 Jenis Jenis Anggaran Pendidikan

Anggaran Anggaran pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yang masing-masing memiliki tujuan dan fokus yang berbeda. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (K. P. dan K. R. Indonesia 2020) jenis-jenis anggaran pendidikan antara lain:

1. Anggaran Operasional

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan sehari-hari dalam pendidikan, seperti gaji guru, biaya administrasi, dan pengadaan bahan ajar. Anggaran ini sangat penting untuk memastikan kelangsungan operasional lembaga pendidikan.

2. Anggaran Investasi

Dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, seperti gedung sekolah, laboratorium, dan fasilitas olahraga. Investasi dalam infrastruktur pendidikan sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

3. Anggaran Program Khusus

Dana yang dialokasikan untuk program-program tertentu, seperti pendidikan inklusif, pelatihan guru, dan beasiswa untuk siswa berprestasi.

Program-program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam pendidikan dan mendukung kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Setiap jenis anggaran memiliki tujuan dan fokus yang berbeda, tetapi semuanya saling melengkapi untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2020) penting untuk memiliki keseimbangan antara anggaran operasional dan investasi agar pendidikan dapat berkembang secara berkelanjutan.

2.3.1.3 Ciri-ciri Anggaran Pendidikan

Ciri-ciri anggaran pendidikan mencakup:

1. Transparansi

Proses pengelolaan anggaran harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Transparansi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan. (K. P. dan K. R. Indonesia 2020).

2. Akuntabilitas

Penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (K. P. dan K. R. Indonesia 2020).

3. Partisipasi

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas program pendidikan. (K. P. dan K. R. Indonesia 2020).

Ciri-ciri ini penting untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Menurut Transparency International (2019), transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan dapat mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan dana.

2.1.2.5 Alokasi dan Sumber Dana Anggaran Pendidikan

Alokasi Anggaran pendidikan mencakup penentuan berapa banyak dana yang akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan pendidikan. Sumber dana anggaran pendidikan meliputi:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk sektor pendidikan. APBN merupakan sumber utama pendanaan pendidikan di Indonesia. (K. P. dan K. R. Indonesia 2020).

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk pendidikan di wilayahnya. APBD berperan penting dalam mendukung pendidikan di tingkat lokal. (K. P. dan K. R. Indonesia 2020).

3. Sumber Swasta

Donasi, sponsor, dan investasi dari sektor swasta yang mendukung pendidikan. Kerjasama dengan sektor swasta dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses. (K. P. dan K. R. Indonesia 2020).

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2020), penting untuk memanfaatkan berbagai sumber dana untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan mencukupi kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Diversifikasi sumber dana juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendanaan.

2.1.2.5 Indikator Anggaran Pendidikan

Indikator anggaran pendidikan digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pendidikan. Beberapa indikator yang umum digunakan meliputi:

1. Rasio Anggaran Pendidikan terhadap PDB

Indikator ini mengukur seberapa besar proporsi anggaran pendidikan dibandingkan dengan produk domestik bruto suatu negara. Hal ini memberikan gambaran tentang komitmen pemerintah terhadap pendidikan (Sasongko 2021).

2. Rasio Gaji Guru terhadap Anggaran Pendidikan

Indikator ini mengukur seberapa besar proporsi anggaran yang dialokasikan untuk gaji guru. Gaji yang memadai untuk guru sangat penting untuk menarik dan mempertahankan tenaga pendidik yang berkualitas (Mongan 2019).

3. Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat Partisipasi Sekolah: Indikator ini mengukur persentase anak usia sekolah yang terdaftar di lembaga pendidikan. Ini penting untuk mengevaluasi akses pendidikan dan mengidentifikasi kelompok yang terpinggirkan (Cahyani et al. 2024)

Indikator-indikator ini penting untuk mengevaluasi kinerja sistem pendidikan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif. Penggunaan indikator yang tepat dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis data dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan (UNESCO 2015).

2.1.2.6 Hubungan Anggaran Pendidikan Terhadap Pembangunan Manusia

Anggaran pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan manusia. Pendidikan yang berkualitas berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan menyediakan akses pendidikan yang setara, anggaran pendidikan berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Sebagaimana diungkapkan dalam laporan World Bank (2018), investasi yang memadai dalam pendidikan melalui anggaran yang tepat adalah kunci untuk mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan inovatif.

2.1.3 Anggaran Kesehatan

Baharudin Akbar, 2025

PENGARUH ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA PERIODE 2016-2023

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Anggaran kesehatan merupakan rencana keuangan yang disusun untuk mendukung pengeluaran dan investasi di sektor kesehatan. Rencana ini mencakup berbagai elemen, mulai dari pembangunan infrastruktur kesehatan hingga pengadaan obat-obatan dan penyediaan layanan kesehatan. Dalam hal ini, anggaran kesehatan berperan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kesehatan yang lebih luas serta memastikan akses yang adil bagi seluruh individu (Sachs 2015).

2.1.2.5 Konsep Anggaran Kesehatan

Konsep anggaran kesehatan melibatkan alokasi sumber daya keuangan untuk berbagai kegiatan di sektor kesehatan. Ini mencakup penentuan jumlah dana yang akan dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit, puskesmas, pengadaan obat, dan program-program kesehatan lainnya. Menurut buku Anggaran Kesehatan Dalam APBN yang disusun oleh Tim Penyusun Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI (2016), alokasi yang tepat dan efisien dari anggaran kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek kesehatan mendapatkan perhatian yang memadai. Dengan alokasi yang tepat, diharapkan dapat tercapai peningkatan kualitas layanan kesehatan dan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, anggaran kesehatan juga mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, anggaran kesehatan tidak hanya dilihat sebagai angka, tetapi juga sebagai indikator dari prioritas dan nilai-nilai yang dipegang oleh suatu negara. Hal ini sejalan dengan pandangan World Bank (2017) yang menyatakan bahwa investasi dalam kesehatan adalah salah satu cara paling efektif untuk mencapai pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.3.2 Fungsi Anggaran Kesehatan

Fungsi anggaran kesehatan dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama:

1. Fungsi Alokatif

Berkaitan dengan pengalokasian sumber daya keuangan untuk berbagai kegiatan kesehatan. Fungsi ini memastikan bahwa dana digunakan untuk kegiatan yang memberikan dampak positif terbesar bagi kesehatan masyarakat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia K. K. R. Indonesia (2022), alokasi

yang tepat sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pelayanan kesehatan.

2. Fungsi Distributif

Berfokus pada distribusi sumber daya kesehatan secara adil di seluruh lapisan masyarakat. Fungsi ini berperan dalam mengurangi kesenjangan kesehatan antara kelompok-kelompok sosial ekonomi yang berbeda, sehingga semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas.

3. Fungsi Stabilisasi

Berkaitan dengan peran anggaran dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi melalui kesehatan. Kesehatan yang baik dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan pengembangan masyarakat yang lebih baik. Fungsi ini juga mencakup respons terhadap perubahan kondisi kesehatan masyarakat, di mana anggaran kesehatan dapat digunakan untuk mendukung program-program yang membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Ketiga fungsi ini saling terkait dan berkontribusi pada pencapaian tujuan kesehatan yang lebih baik. Dengan memahami fungsi-fungsi ini, pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan kesehatan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.1.3.3 Tujuan Anggaran Kesehatan

Tujuan anggaran kesehatan adalah untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang adil dan setara terhadap layanan kesehatan berkualitas. Beberapa tujuan spesifik dari anggaran kesehatan meliputi:

1. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan

Memastikan bahwa semua orang, terutama dari kelompok rentan, memiliki kesempatan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Ini termasuk penyediaan fasilitas kesehatan, obat-obatan, dan program-program yang mendukung kesehatan masyarakat.

2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Baharudin Akbar, 2025

PENGARUH ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA PERIODE 2016-2023

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Mengalokasikan dana untuk pelatihan tenaga kesehatan, pengembangan sistem informasi kesehatan, dan pengadaan peralatan medis yang berkualitas. Menurut WHO (Organization 2010), peningkatan kualitas layanan kesehatan adalah kunci untuk mencapai hasil kesehatan yang lebih baik.

3. Pengurangan Kesenjangan dalam Kesehatan

Mengatasi disparitas dalam akses dan kualitas layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan di daerah terpencil dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kesehatan di daerah tersebut.

Dengan merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif, diharapkan anggaran kesehatan dapat mendukung pencapaian tujuan kesehatan yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan komitmen global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serangkaian 17 tujuan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau (SDGs), khususnya SDG 3 yang menekankan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan untuk semua orang.

2.1.2.4 Jenis-jenis Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Anggaran Operasional

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan sehari-hari dalam sektor kesehatan, seperti gaji tenaga kesehatan, biaya administrasi, dan pengadaan obat-obatan. Anggaran ini sangat penting untuk memastikan kelangsungan operasional fasilitas kesehatan.

2. Anggaran Investasi

Dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Investasi dalam infrastruktur kesehatan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelayanan kesehatan yang baik.

3. Anggaran Program Khusus

Baharudin Akbar, 2025

PENGARUH ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA PERIODE 2016-2023

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dana yang dialokasikan untuk program-program tertentu, seperti imunisasi, program kesehatan ibu dan anak, dan pencegahan penyakit menular. Program-program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kesehatan dan mendukung kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Setiap jenis anggaran memiliki tujuan dan fokus yang berbeda, tetapi semuanya saling melengkapi untuk mencapai tujuan kesehatan yang lebih baik. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (K. K. R. Indonesia 2020), penting untuk memiliki keseimbangan antara anggaran operasional dan investasi agar sektor kesehatan dapat berkembang secara berkelanjutan.

2.1.2.5 Ciri-ciri Anggaran Kesehatan

Menurut Transparency International (2019) Ciri-ciri anggaran kesehatan mencakup:

1. Transparansi

Proses pengelolaan anggaran harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Transparansi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana kesehatan.

2. Akuntabilitas

Penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Partisipasi

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran kesehatan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas program kesehatan.

Ciri-ciri ini penting untuk memastikan bahwa anggaran kesehatan dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Menurut Transparency International (2019) transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kesehatan dapat mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan dana.

2.1.2.6 Alokasi dan Sumber Dana Anggaran Kesehatan

Alokasi anggaran kesehatan mencakup penentuan berapa banyak dana yang akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan kesehatan. Sumber dana anggaran kesehatan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk sektor kesehatan. APBN merupakan sumber utama pendanaan kesehatan di Indonesia.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk kesehatan di wilayahnya. APBD berperan penting dalam mendukung kesehatan di tingkat lokal.

3. Sumber Swasta

Donasi, sponsor, dan investasi dari sektor swasta yang mendukung kesehatan. Kerjasama dengan sektor swasta dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memperluas akses.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (K. K. R. Indonesia 2020) penting untuk memanfaatkan berbagai sumber dana untuk memastikan bahwa anggaran kesehatan mencukupi kebutuhan kesehatan yang terus berkembang. Diversifikasi sumber dana juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendanaan.

2.1.2.7 Indikator Anggaran Kesehatan

Indikator anggaran kesehatan digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan dana kesehatan. Beberapa indikator yang umum digunakan meliputi:

1. Rasio Anggaran Kesehatan terhadap PDB

Mengukur seberapa besar proporsi anggaran kesehatan dibandingkan dengan produk domestik bruto suatu negara. Indikator ini memberikan gambaran tentang komitmen pemerintah terhadap kesehatan.

2. Rasio Gaji Tenaga Kesehatan terhadap Anggaran Kesehatan

Mengukur seberapa besar proporsi anggaran yang dialokasikan untuk gaji tenaga kesehatan. Gaji yang memadai untuk tenaga kesehatan sangat penting untuk menarik dan mempertahankan tenaga medis yang berkualitas.

3. Tingkat Akses Layanan Kesehatan

Mengukur persentase populasi yang memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar. Indikator ini penting untuk mengevaluasi akses kesehatan dan mengidentifikasi kelompok yang terpinggirkan.

Indikator-indikator ini penting untuk mengevaluasi kinerja sistem kesehatan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif. Menurut WHO *World Health Organization* (2010) penggunaan indikator yang tepat dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis data dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kesehatan.

2.1.2.8 Hubungan Anggaran Kesehatan Terhadap Pembangunan Manusia

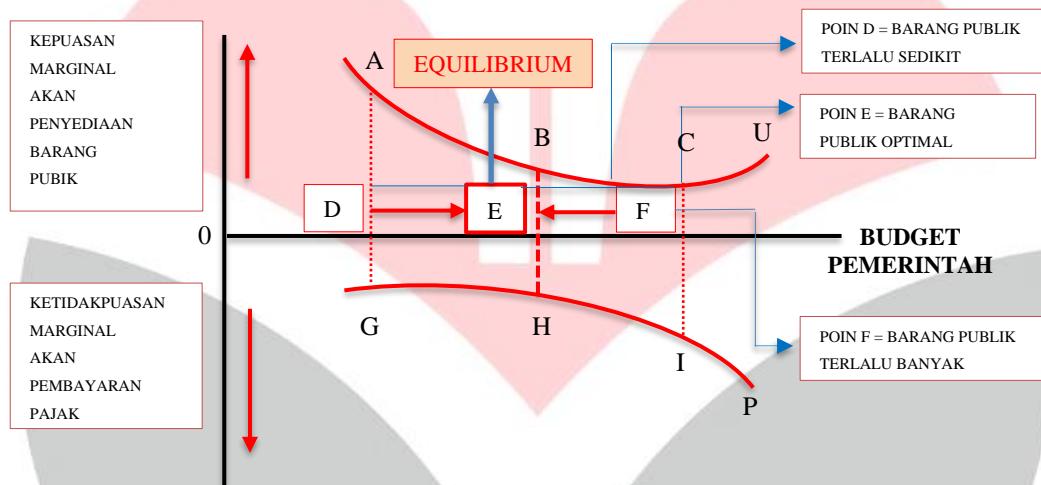
Anggaran kesehatan memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan manusia. Kesehatan yang baik berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan memberikan akses kesehatan yang setara, anggaran kesehatan dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Menurut laporan Bank Dunia *World Bank* (2017) investasi dalam kesehatan melalui anggaran yang memadai adalah kunci untuk mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan. Kesehatan yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi, menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan inovatif. Dengan demikian, anggaran kesehatan bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan investasi strategis untuk masa depan bangsa.

2.1.4 Teori Pengeluaran Pemerintah

2.1.4.1 Teori Pigou

Pengeluaran pemerintah memiliki peranan penting dalam menentukan jumlah dan jenis barang publik yang tersedia bagi masyarakat. Barang publik seperti pendidikan dan kesehatan merupakan elemen fundamental dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Penyediaan barang publik oleh pemerintah tidak hanya berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup individu tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.



Gambar 2. 1 Theory of Pigou 1920

Sumber: Ekonomi Publik, 2020

Barang publik yang optimal pada Gambar 1.1 kurva kepuasan Barang publik ditampilkan dengan kurva yang benar. Kurva yang benar Bentuk yang menunjukkan telah dikurangi Banyak barang publik yang diproduksi akan lebih rendah Kepuasan perbatasan yang bisa dirasakan masyarakat. di sisi lain, Semakin banyak pajak yang di kumpulkan, semakin besar rasanya Kepuasan perbatasan dengan masyarakat. Dalam teori ekonomi, Pigou (1920) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial meningkat seiring dengan penyediaan barang publik. Namun, pembiayaan barang publik bergantung pada pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, yang dapat berdampak pada kesejahteraan individu. Oleh karena itu, kurva Batasan formulir untuk kepuasan dengan pembayaran pajak. Ketidakpuasan

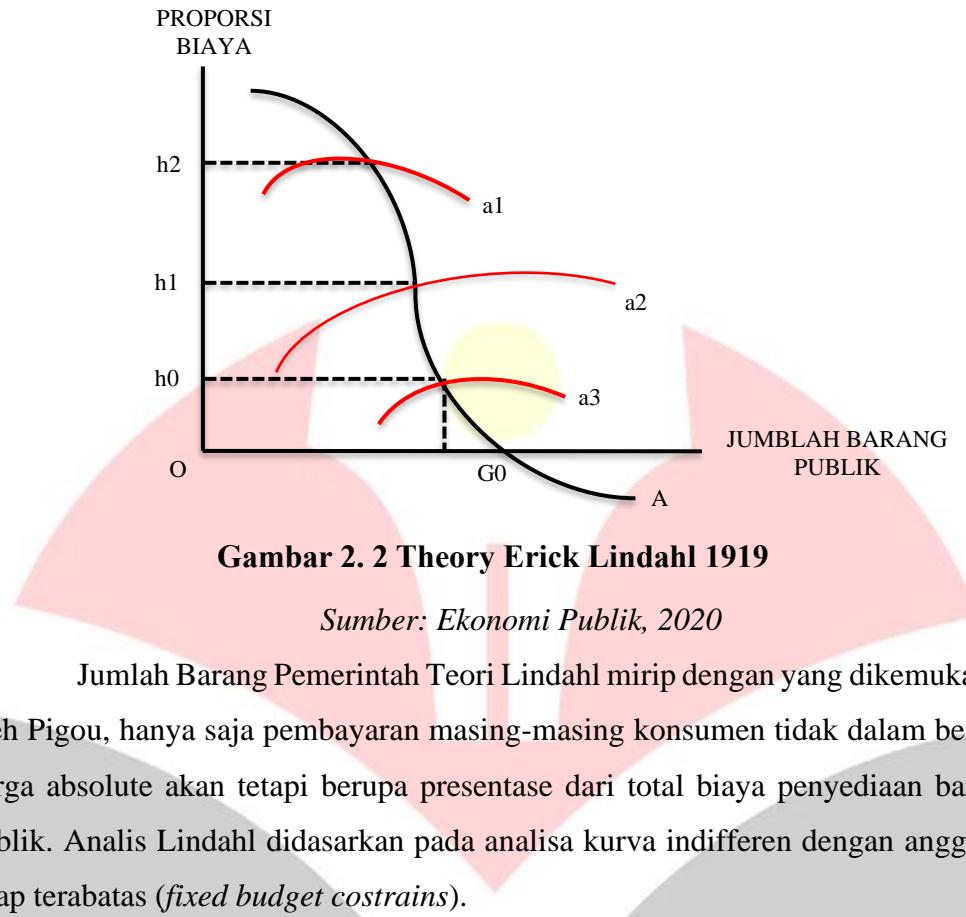
sekecil apa pun ditunjukkan oleh sumbu Ini ditunjukkan oleh kurva PP. Titik E adalah kondisi optimal Komunitas kepuasan marjinal untuk barang publik dan Batas dan kepuasan pembayaran pajak. Kelemahan Analisis yang didasarkan pada keluhan tentang keluhan kecil Mereka yang membayar pajak dan kepuasan marjinal Sementara kami puas dan tidak puas, barang public Sulit untuk mengukur secara kuantitatif karena kesulitannya ordinal.

Oleh karena itu, terdapat titik keseimbangan antara manfaat tambahan dari barang publik (*marginal utility*) dan dampak negatif dari beban pajak (*marginal disutility*). Jika tambahan barang publik memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya pajak yang dikeluarkan, intervensi pemerintah menjadi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.2 Teori Erick Lindahl

Teori Lindahl, yang dikemukakan pada tahun 1919, memberikan wawasan penting mengenai mekanisme pembiayaan barang publik, termasuk pendidikan. Teori ini menekankan bahwa setiap individu seharusnya membayar sesuai dengan manfaat yang mereka terima dari layanan publik. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam distribusi beban pajak, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks ini, Lindahl berargumen bahwa sistem perpajakan yang adil dan proporsional akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembiayaan barang publik, karena individu merasa bahwa kontribusi mereka sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Dalam praktiknya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pajak yang dikumpulkan dialokasikan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup pengalokasian anggaran pendidikan yang memadai, yang telah terbukti memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan manusia. Penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.



Gambar 2. 2 Theory Erick Lindahl 1919

Sumber: Ekonomi Publik, 2020

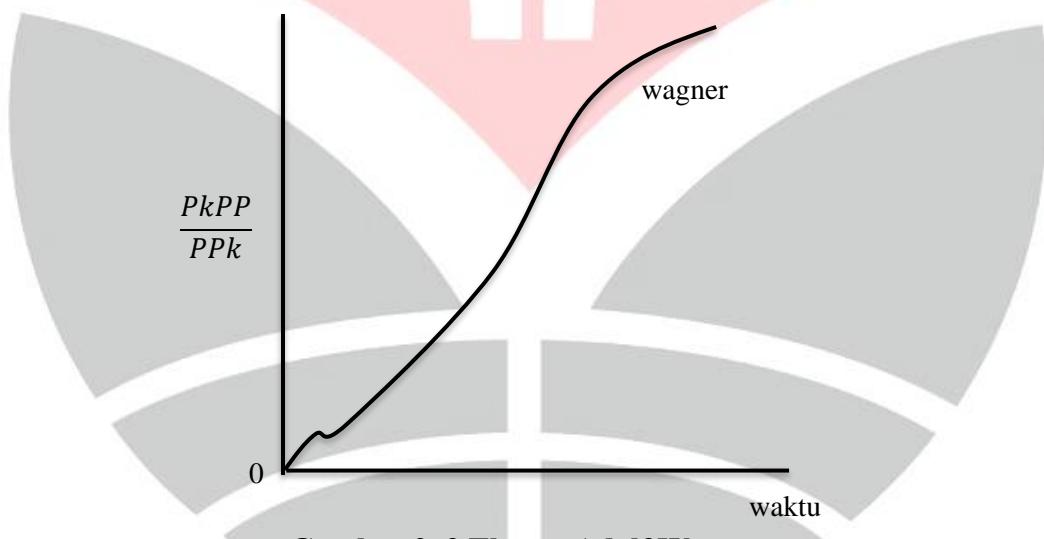
Jumlah Barang Pemerintah Teori Lindahl mirip dengan yang dikemukakan oleh Pigou, hanya saja pembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolute akan tetapi berupa presentase dari total biaya penyediaan barang publik. Analis Lindahl didasarkan pada analisa kurva indifferen dengan anggaran tetap terabatas (*fixed budget costrains*).

Kelemahan teori Lindahl adalah karena teori ini hanya membahas mengenai barang publik tanpa membahas mengenai penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektor swasta. Selain itu kelemahan utamanya adalah penggunaan kurva indifferen. Sifat barang publik tidak dapat dikecualikan menyebabkan tidak ada seorang individu juga yang bersedia menunjukkan prefrensinya terhadap barang publik. kritikan lainya ialah teori ini hanya melihat penyediaan barang publik saja tanpa memperhitungkan jumlah barang swasta yang seharusnya diproduksi agar masyarakat mencapai kesejahteraan optimal.

Dengan demikian, teori Lindahl memberikan kerangka kerja yang relevan untuk memahami pentingnya keadilan dalam pembiayaan pendidikan dan peran pemerintah dalam menciptakan sistem yang mendukung akses yang merata terhadap layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.1.4.3 Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner merupakan salah satu tokoh penting yang mengemukakan teori dalam bidang pengeluaran pemerintah, termasuk anggaran pendidikan. Ekonom Jerman Adolph Wagner (1835-1917) menyatakan bahwa ukuran pemerintah diukur oleh pengeluaran publik meningkat secara proporsional lebih besar dari pertumbuhan pendapatan nasional. Wagner dikenal dengan konsep yang kemudian dikenal sebagai "Hukum Wagner," yang menyatakan bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara, pengeluaran pemerintah juga akan mengalami peningkatan, khususnya dalam sektor-sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks anggaran pendidikan, teori Wagner menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan nasional dan kemajuan ekonomi akan mendorong masyarakat dan pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke bidang pendidikan.



Gambar 2. 3 Theory Adolf Wagner

Sumber: Ekonomi Publik, 2020

Dalam kurva di atas, $PkPP$ adalah pengeluaran pemerintah per kapita dan PPk adalah pendapatan per kapita. Semakin bertumbuh suatu perekonomian negara, maka rasio perbandingan pengeluaran pemerintah per kapita dengan pendapatan per kapita akan semakin tinggi. Hukum Wagner ini didasari pada kecenderungan

umum pertumbuhan ukuran pemerintah. Pertumbuhan ukuran pemerintah diakibatkan oleh beberapa alasan seperti:

1. Peningkatan permintaan untuk belanja publik
2. Peningkatan penyediaan penerimaan pajak
3. Alasan politik-ekonomi, termasuk perluasan wilayah negara

Inflasi dan pengangguran adalah masalah pelik yang selalu dihadapi oleh Negara Indonesia terkait belum berkualitasnya pertumbuhan ekonomi. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang kompleks. Inflasi memiliki hubungan dengan banyak masalah ekonomi yang lain. Inflasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masalah-masalah ekonomi lain tersebut.

Hal ini disebabkan oleh tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan kebutuhan akan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik untuk menunjang pembangunan nasional. Dengan kata lain, ketika sebuah negara berkembang dan kesejahteraan masyarakat meningkat, maka prioritas pengeluaran negara pun akan bergeser menuju investasi sosial yang menghadirkan manfaat jangka panjang, di antaranya melalui peningkatan anggaran pendidikan. Teori ini memberi landasan bahwa alokasi anggaran pendidikan bukan semata-mata beban belanja publik, melainkan merupakan investasi strategis yang esensial dalam mendorong kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara.

Oleh karena itu, teori Wagner menjadi kerangka penting untuk memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kebijakan penganggaran pendidikan, sekaligus menegaskan peran pemerintah dalam menyediakan anggaran yang memadai guna meningkatkan mutu pendidikan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan

2.2 Penelitian Terdahulu

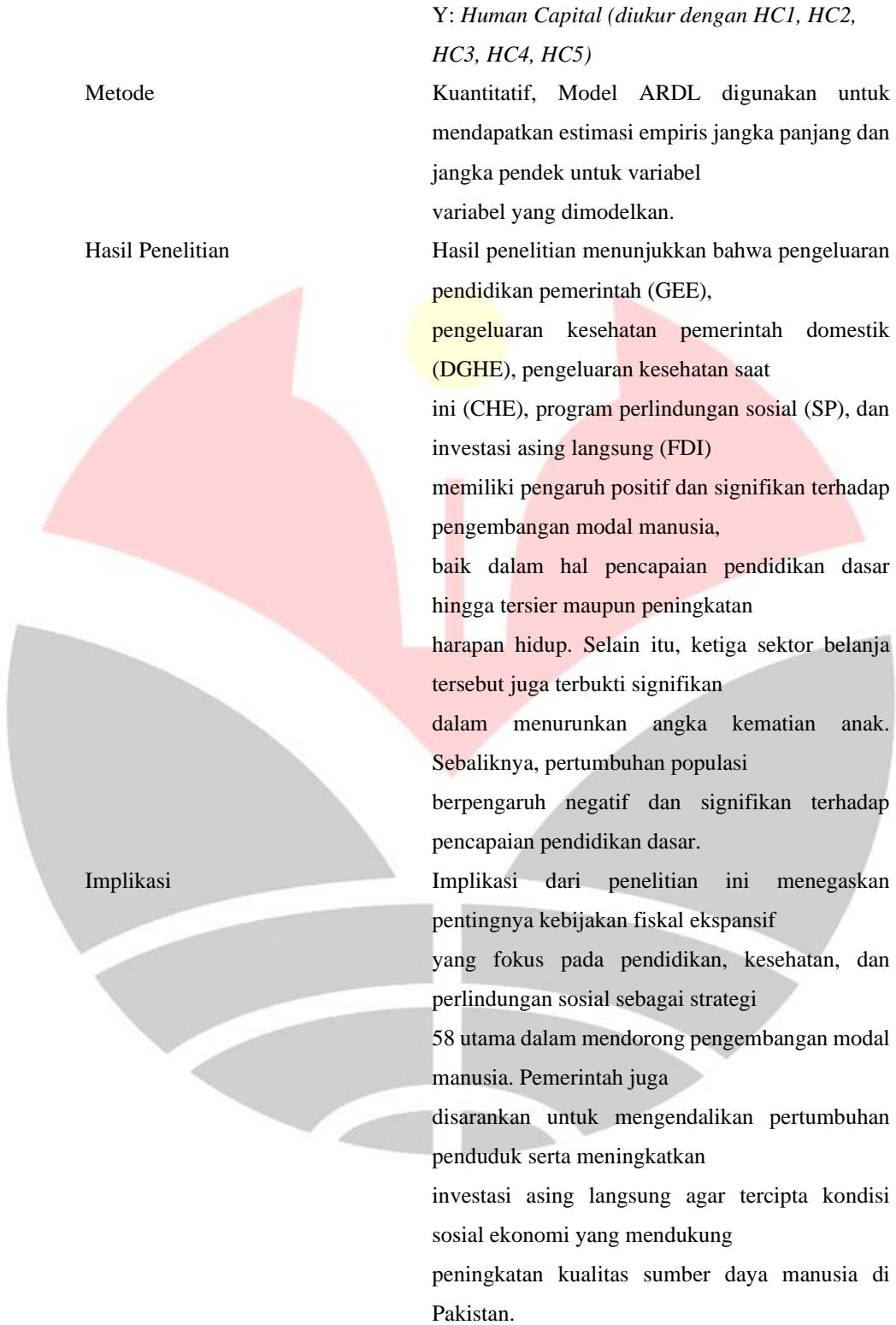
Penelusuran literatur diperlukan untuk menemukan kebenaran atas argumen yang mendasari penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu penulis mengangkat beberapa penelitian yang dijadikan sebagai sumber referensi untuk dapat memperkaya bahan kajian pada penelitian. Berikut beberapa sumber rujukan penelitian terdahulu yang berupa jurnal dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Keterangan	Penjelasan
1.	Judul/Tahun	<i>Impact Of Government Expenditure On Human Capital Development In Nigeria (2023)</i>
	Penulis	Alfred Cyprain Bognet, Darius Akan Yashim, Adedayo Olufunsho Momoh, Abubakar Inuwa Bello, Babangida Sarki
	Nama Jurnal	<i>Benue Journal of Social Sciences (BJSS)</i>
	Reputasi Jurnal	Science Direct
	Variabel	X1: <i>Government Education Expenditure (GEE)</i> X2: <i>Government Health Expenditure (GHE)</i> X3: <i>Real Gross Domestic Product (RGDP)</i> X4: <i>Inflation Rate (INFR)</i> X5: <i>Control of Corruption (COCR)</i> Y : <i>Human Development Index (HDI)</i>
	Metode	Kuantitatif, Menggunakan model <i>Autoregressive Distributed Lag (ARDL)</i> sebagai alat pengujian untuk melihat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Variabel dependen adalah Human Development Index (HDI), yang berfungsi sebagai proksi untuk pengembangan modal manusia.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks

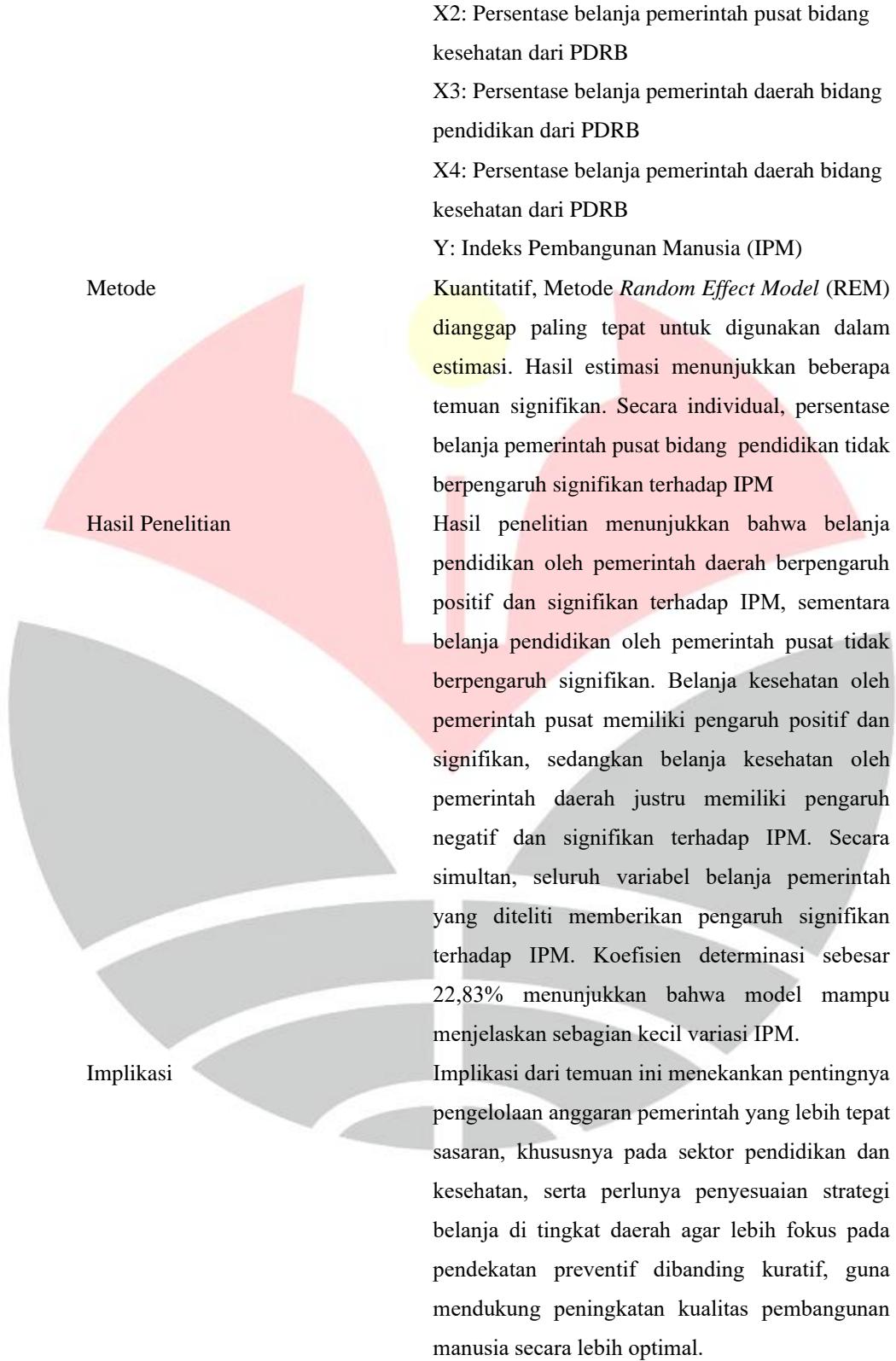
	Pembangunan Manusia (HDI) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengeluaran kesehatan berpengaruh signifikan hanya dalam jangka pendek, namun tidak signifikan dalam jangka panjang. Selain itu, PDB riil berpengaruh signifikan dalam jangka panjang, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan dalam dua periode, dan kontrol korupsi tidak berpengaruh signifikan. Nilai R^2 sebesar 89,27% menunjukkan bahwa model menjelaskan sebagian besar variasi dalam HDI.
2. Implikasi	Implikasinya, pendidikan terbukti menjadi sektor strategis dalam peningkatan kualitas manusia secara berkelanjutan, sementara sektor kesehatan memerlukan pengelolaan yang lebih
2. Judul/Tahun	<i>The Impact of Health Spending, Education Spending and Economic Growth on Human Development: A Provincial Panel Analysis (2022)</i>
Penulis	Rosdiana Sijabat
Nama Jurnal	<i>Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)</i>
Reputasi Jurnal	Sinta
Variabel	X1: <i>Health Spending (HEALTH)</i> X2: <i>Education Spending (EDU)</i> X3: <i>Regional Economic Growth (GRDP)</i> Y: <i>Human Development Index (HDI)</i>
Metode	Kuantitatif, Menggunakan metode regresi data panel. Setelah melalui uji <i>Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier (LM)</i> , model efek acak (<i>Random Effect Model/REM</i>) dipilih sebagai model yang paling sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan (EDU) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap IPM.

	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Setiap kenaikan 1% dalam proporsi pengeluaran pendidikan berkorelasi dengan peningkatan IPM sebesar 7,238 poin. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi regional (GRDP) justru memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, yang mengindikasikan adanya ketimpangan antarwilayah. Sementara itu, pengeluaran kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Secara simultan, ketiga variabel menjelaskan 44,6% variasi dalam IPM.
	Implikasi	Implikasinya, pemerintah daerah perlu memprioritaskan alokasi anggaran pendidikan karena terbukti menjadi faktor paling strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Indonesia, sedangkan efektivitas pengeluaran kesehatan masih perlu dievaluasi lebih lanjut.
3.	Judul/Tahun	<i>Is government spending in the education and health sector necessary for human capital development? (2023)</i>
	Penulis	Shazia Kousar, Farhan Ahmed, Muhammad Afzal, & Juan E. Trinidad Segovia
	Nama Jurnal	<i>Humanities And Social Sciences Communications</i>
	Reputasi Jurnal	Sinta
	Variabel	<p>X1: <i>Current Health Expenditure (CHE)</i></p> <p>X2: <i>Domestic Government Health Expenditure (DGHE)</i></p> <p>X3: <i>Government Education Expenditure (GEE)</i></p> <p>X4: <i>Social Protection (SP)</i></p> <p>X5: <i>Population Growth (POP)</i></p> <p>X6: <i>Foreign Direct Investment (FDI)</i></p>



<p>Penulis</p> <p>Reputasi Jurnal</p> <p>Variabel</p> <p>Metode</p> <p>Hasil Penelitian</p> <p>Implikasi</p>	4.	Judul/Tahun	<i>The Effect of Government Expenditure on Education and Health on Human Development Index in Boven Digoel District (2023)</i>
		Penulis	Agnes Lutherani. Ch. P. Lopian, Een Novritha Walewangko, Dennij Mandeij, & Lis M. Yapanto
		Nama Jurnal	<i>Journal for Re Attach Therapy and Developmental Diversities</i>
		Reputasi Jurnal	Science Direct
		Variabel	X1: <i>Government Expenditure on Education</i> X2: <i>Government Expenditure on Health</i> Y: <i>Human Development Index (HDI)</i>
		Metode	Kuantitatif, Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 23.
	5.	Judul/Tahun	Hasil Penelitian
		Penulis	<p>Hasil menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, ditunjukkan oleh nilai signifikansi di atas 0,05. Sebaliknya, pengeluaran kesehatan berpengaruh positif dan signifikan, dengan nilai signifikansi 0,005. Secara simultan, kedua sektor berpengaruh signifikan terhadap IPM di Boven Digoel.</p> <p>Implikasinya, pengeluaran sektor kesehatan terbukti efektif dalam mendorong peningkatan IPM, sementara sektor pendidikan memerlukan optimalisasi anggaran dan perbaikan kualitas layanan agar berkontribusi nyata terhadap pembangunan manusia. Pemerintah disarankan memperkuat efektivitas belanja pendidikan dan mempertahankan prioritas anggaran kesehatan.</p>
			Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara (2015)
			Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rumate, dan Hanly F. DJ. Siwu

	Nama Jurnal	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi
	Reputasi Jurnal	Google Scholar
	Variabel	X1: Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan X2: Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan Y: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Metode	Kuantitatif, Model analisis yang diterapkan adalah regresi berganda, dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 21.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, dengan koefisien regresi sebesar 0,870. Sebaliknya, pengeluaran kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan, dengan koefisien -0,438. Uji parsial (t) menguatkan bahwa hanya sektor pendidikan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Nilai <i>R-squared</i> sebesar 0,649 menunjukkan bahwa 64,9% variasi IPM dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Uji F juga menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan layak.
	Implikasi	Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa prioritas alokasi anggaran di sektor pendidikan sangat penting untuk meningkatkan pembangunan manusia di Sulawesi Utara, sementara sektor kesehatan perlu perbaikan agar bisa memberikan kontribusi nyata terhadap IPM.
6.	Judul/Tahun	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia (2019)
	Penulis	Jehuda Jean Sanny Mongan
	Nama Jurnal	Indonesian Treasury Review
	Reputasi Jurnal	Google Scholar
	Variabel	X1: Persentase belanja pemerintah pusat bidang pendidikan dari PDRB



7.	Judul/Tahun	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Makanan Perkapita, dan Rasio Ketergantungan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Provinsi Lampung (2024)
	Penulis	Adisa Regita Cahyani, Neli Aida, Dedy Yuliawan
	Nama Jurnal	Jurnal Ekobistik
	Reputasi Jurnal	Google Scholar
	Variabel	X1: Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan X2: Pengeluaran Makanan Perkapita X3: Rasio Ketergantungan Y: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Metode	Kuantitatif, Model <i>Random Effect Model</i> (REM), yang dipilih setelah melalui serangkaian uji spesifikasi model, yaitu Uji <i>Chow</i> , Uji <i>Hausman</i> , dan Uji <i>Lagrange Multiplier</i> .
	Hasil Penelitian	Hasil estimasi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sebaliknya, pengeluaran makanan per kapita dan rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Secara simultan, ketiga variabel bebas tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap IPM, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 51,44%.
	Implikasi	Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan anggaran sektor kesehatan dapat meningkatkan IPM, sedangkan tingginya pengeluaran makanan per kapita dan rasio ketergantungan justru menjadi hambatan bagi pembangunan manusia. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang tidak hanya meningkatkan belanja kesehatan, tetapi juga mengendalikan struktur ketergantungan penduduk dan meningkatkan keseimbangan pengeluaran rumah

		tangga untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Lampung.
8.	Judul/Tahun	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Ipm Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara (2018)
	Penulis	Thembry O. M. Palenewen, Een N. Walewangko, Jacline I. Sumual
	Nama Jurnal	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi
	Reputasi Jurnal	Google Scholar
	Variabel	X1: Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan X2: Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Y1: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Y2: Kemiskinan
	Metode	Kuantitatif, Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan regresi berganda, dengan bantuan perangkat lunak <i>Eviews</i> 13.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dan kemiskinan. Sebaliknya, pengeluaran kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM dan berpengaruh negatif serta signifikan terhadap kemiskinan. IPM sendiri tidak signifikan dalam memengaruhi kemiskinan.
	Implikasi	Implikasinya, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan perlu dievaluasi agar tepat sasaran, serta penguatan efektivitas program pembangunan manusia dan penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Utara perlu ditingkatkan
9.	Judul/Tahun	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Manado (2021)
	Penulis	Irman F. Ismail, Een N. Walewangko, Javline I. Sumual

Nama Jurnal	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi	
Reputasi Jurnal	Google Scholar	
Variabel	X1: Pertumbuhan Ekonomi	
	X2: Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	
	X3: Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan	
	Y: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
Metode	Kuantitatif, Analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan menggunakan Uji Asumsi Klasik dan Regresi Linear Berganda. Berdasarkan perhitungan menggunakan Eviews 13, nilai koefisien determinasi (<i>R-squared</i>) yang diperoleh sebesar 0,962889 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah 96,29%.	
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pendidikan tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM. Nilai <i>R-squared</i> sebesar 96,29% menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan variasi IPM secara kuat.	
Implikasi	Implikasinya, pemerintah daerah perlu memperkuat intervensi di sektor kesehatan karena terbukti berdampak nyata terhadap peningkatan IPM, sementara alokasi di sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi perlu evaluasi agar lebih efektif dalam menunjang pembangunan manusia	
10.	Judul/Tahun	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Boven Digoel (2022)

	Penulis	Wilhelmus Mahuze, Vecky A. J. Masinambow, Agnes L. Ch. P. Lapian
	Nama Jurnal	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi
	Reputasi Jurnal	Google Scholar
	Variabel	X1: Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Pendidikan X2: Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Kesehatan Y: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Metode	Kuantitatif, Dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS versi 23, meliputi uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi.
	Hasil Penelitian	Hasil menunjukkan bahwa secara parsial, pengeluaran pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan pengeluaran kesehatan berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, keduanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, dengan kontribusi sebesar 77,4% terhadap variasi IPM.
	Implikasi	Implikasinya, alokasi anggaran pendidikan perlu ditingkatkan karena belum berdampak signifikan, sementara anggaran kesehatan perlu dipertahankan dan diperkuat. Pemerintah daerah disarankan untuk memenuhi alokasi minimal sesuai UU agar mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.
11.	Judul/Tahun	Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia (2020)
	Penulis	Angga Setiawan, Fikriah
	Nama Jurnal	Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

	Reputasi Jurnal	Google Scholar
	Variabel	X1: Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan X2: Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan X3: Belanja Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial
	Metode	Y: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kuantitatif, Hasil pengujian model menunjukkan <i>Random Effect Model</i> (REM) adalah yang paling tepat.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sementara belanja perlindungan sosial justru berpengaruh negatif dan signifikan. Koefisien determinasi sebesar 0,347 menunjukkan bahwa 34,7% variasi IPM dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut.
	Implikasi	Implikasinya, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas belanja khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan agar berdampak optimal terhadap pembangunan manusia. Belanja perlindungan sosial juga perlu diarahkan secara efisien agar tidak mengurangi kemandirian masyarakat. Disarankan agar provinsi dapat meningkatkan IPM minimal 1% setiap tahun.
12.	Judul/Tahun	Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh (2019)
	Penulis	Wahyuni dan Fikriah
	Nama Jurnal	Ekonomi Pembangunan
	Reputasi Jurnal	Google Schooler
	Variabel	X1: Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan X2: Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan
	Metode	Y: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kuantitatif, Model analisis

		yang dipilih adalah <i>Fixed Effect Model</i> (FEM), berdasarkan hasil Uji <i>Chow</i> dan Uji <i>Hausman</i> . Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, mendukung teori investasi sumber daya manusia. Sebaliknya, belanja kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM secara parsial, diduga akibat ketidakefektifan alokasi anggaran atau lemahnya pengawasan. Secara simultan, kedua belanja tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 85,68%.
	Hasil Penelitian	Implikasi
13.	Judul/Tahun	Pengaruh Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Utara (2018)
	Penulis	Rizky Amelia dan Siti Norma
	Nama Jurnal	Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
	Reputasi Jurnal	Google Schooler
	Variabel	X1: Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan X2: Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan Y: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Metode	Kuantitatif, Metode analisis regresi data panel diterapkan, dengan pemilihan <i>Fixed Effect Model</i>

	(FEM) sebagai model terbaik berdasarkan Uji <i>Chow</i> dan Uji <i>Hausman</i> .
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik belanja pendidikan maupun kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, baik secara parsial maupun simultan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran di kedua sektor berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Model yang digunakan menjelaskan 90,12% variasi IPM di Sumatera Utara.
Implikasi	Implikasinya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disarankan untuk terus meningkatkan efektivitas dan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan guna mempercepat peningkatan IPM. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, atau infrastruktur untuk hasil yang lebih komprehensif.
14. Judul/Tahun	Pengaruh Anggaran Bidang Pendidikan Dan Anggaran Bidang Kesehatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia (2025)
Penulis	Susilawati, Muhammad Syukri
Nama Jurnal	Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis
Reputasi Jurnal	Google Schooler
Variabel	X1: Anggaran Bidang Pendidikan X2: Anggaran Bidang Kesehatan X3: Pertumbuhan Ekonomi
Metode	Y: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kuantitatif, Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, koefisien determinasi (R^2), serta uji hipotesis F dan T.
Hasil Penelitian	Hasil menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap IPM, dengan nilai R^2 sebesar 49,2%. Secara parsial,

	hanya anggaran kesehatan dan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan anggaran pendidikan tidak berpengaruh signifikan. Koefisien regresi menunjukkan bahwa peningkatan 1 Unit anggaran kesehatan meningkatkan IPM sebesar 3,156 unit, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,127 unit, sementara peningkatan 1% anggaran pendidikan justru menurunkan IPM sebesar 6,614 unit. Implikasinya, pemerintah perlu memperkuat efektivitas penggunaan anggaran pendidikan dan kesehatan, meningkatkan akses layanan dasar, serta memperhatikan pembangunan ekonomi sebagai pendorong utama pembangunan manusia. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel seperti kemiskinan dan infrastruktur untuk analisis yang lebih komprehensif.
15. Judul/Tahun	Nalisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan, Inflasi Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating di Indonesia (2020)
Penulis	A. Mahendra
Nama Jurnal	Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Jmb)
Reputasi Jurnal	Google Schooler
Variabel	X1: Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan X2: Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan X3: Inflasi X4: Kemiskinan Y: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Z: Pertumbuhan Ekonomi (sebagai variabel moderating)
Metode	Kuantitatif, Analisis dilakukan menggunakan regresi berganda serta uji residual.

	Hasil Penelitian	Hasil menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM. Secara parsial, pengeluaran pemerintah dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan kemiskinan tidak. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu menjadi variabel moderasi dalam hubungan ini.
	Implikasi	Implikasinya, stabilitas ekonomi makro tetap penting dalam mendorong IPM. Disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti ekspor, impor, pengangguran, serta mengidentifikasi variabel antara dalam penelitian selanjutnya guna memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan manusia.
16.	Judul/Tahun	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur (2020)
	Penulis	Endah Susanti, Nur Hidayat
	Nama Jurnal	Eco-Build Journal
	Reputasi Jurnal	Google Schooler
	Variabel	X1: Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan X2: Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan X3: Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur Y: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Metode	Kuantitatif, Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode regresi linier berganda untuk menganalisis efek langsung variabel independen terhadap variabel dependen.
	Hasil Penelitian	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Secara Parsial, Pengeluaran Sektor Pendidikan Dan Infrastruktur Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap IPM, Sedangkan Pengeluaran Sektor Kesehatan Berpengaruh Positif Dan Signifikan. Secara Simultan, Ketiga Variabel Tersebut

		Berpengaruh Signifikan Terhadap IPM. Koefisien Pengeluaran Pendidikan Sebesar 0,013 (Tidak Signifikan), Kesehatan Sebesar 0,054 (Signifikan), Dan Infrastruktur Sebesar -0,011 (Tidak Signifikan).
	Implikasi	Implikasinya, Efektivitas Alokasi Anggaran Pendidikan Dan Infrastruktur Masih Perlu Ditingkatkan, Sementara Sektor Kesehatan Sudah Menunjukkan Dampak Nyata Terhadap Peningkatan IPM. Pemerintah Disarankan Untuk Memperbaiki Alokasi Dan Penggunaan Anggaran Secara Tepat Sasaran Dan Efisien, Memperluas Layanan Kesehatan, Serta Menjadikan Pembangunan Infrastruktur Lebih Produktif Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat.
17.	Judul/Tahun	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Langsa (2018)
	Penulis	Puti Andiny, Merlindiana Gus Puja Sari
	Nama Jurnal	Jurnal Samudra Ekonomika
	Reputasi Jurnal	Google Schooler
	Variabel	X1: Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan X2: Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Y: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Metode	Kuantitatif, Model regresi linier berganda yang digunakan (OLS) memiliki kemampuan menjelaskan variasi IPM yang sangat tinggi.
	Hasil Penelitian	Secara simultan, kedua variabel juga berpengaruh signifikan terhadap IPM, dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000. Koefisien determinasi (R-square) sebesar 0,920, menunjukkan bahwa 92% variasi IPM dijelaskan oleh pengeluaran pendidikan dan kesehatan.

	Implikasi	Implikasinya, alokasi anggaran sektor pendidikan dan kesehatan di Kota Langsa terbukti efektif dalam meningkatkan IPM. Pemerintah daerah disarankan untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja pada kedua sektor tersebut demi pembangunan manusia yang berkelanjutan.
18.	Judul/Tahun	Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh (2019) Cut Putri Wahyuni dan Fikriah
	Penulis	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan
	Nama Jurnal	DOI
	Reputasi Jurnal	X1: Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan
	Variabel	X2: Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan
	Metode	Y: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Hasil Penelitian	Kuantitatif, Data panel dari 23 kabupaten/kota di Aceh dengan pendekatan <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) berdasarkan Uji <i>Chow</i> dan Uji <i>Hausman</i> . belanja pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Aceh, menjelaskan 85,68% variasi IPM. Kesimpulannya, belanja pendidikan berdampak positif, sementara belanja kesehatan berdampak negatif secara parsial. Namun, secara bersamaan, keduanya berpengaruh positif signifikan terhadap IPM Aceh. Disarankan agar Pemerintah Aceh meningkatkan efektivitas anggaran pendidikan dan mengevaluasi serta memperbaiki efisiensi belanja kesehatan. Penelitian 78 mendatang dapat menambah variabel relevan lain untuk analisis yang lebih komprehensif.
	Implikasi	

Tabel 2. 2 Rangkuman Penelitian Terdahulu Pengaruh Anggaran Pendidikan terhadap Pembangunan Manusia

Indikator			Metode			Hasil	
Jumlah Anggaran Pendidikan	Fokus Jenjang Pendidikan SD,SMP,SMA	Fokus Jenjang Pendidikan Tinggi	OLS	VAR	Kausalitas Granger	Sig (+)	Tidak Berpengaruh Sig
	Wilhelmus Mahuze et al. (2022), Angga Setiawan & Fikriah (2020), Cut Putri Wahyuni & Fikriah (2019), Rizky Amelia & Siti Norma (2018), Endah Susanti & Nur Hidayat (2020), A. Mahendra (2020), Susilawati & Muhammad Syukri (2025), Agnes Lutherani et al. (2023)	Alfred Bognet (2023)	Wilhelmus Mahuze et al. (2022), Angga Setiawan & Fikriah (2020), Rizky Amelia & Siti Norma (2018), Puti Andiny & Merlindiana (2018)	A. Mahendra (2020), Endah Susanti & Nur Hidayat (2020)	Jaman (2016) ; Yusoff & Febrina (2014)	Angga Setiawan & Fikriah (2020), Rizky Amelia & Siti Norma (2018), Puti Andiny & Merlindiana (2018)	Wilhelmus Mahuze et al. (2022), Susilawati & Muhammad Syukri (2025), Endah Susanti & Nur Hidayat (2020)

Tabel 2.3 Rangkuman Penelitian Terdahulu Pengaruh Anggaran Kesehatan terhadap Pembangunan Manusia

Indikator		Metode		Hasil		
Jumlah Anggaran Kesehatan	Fokus Jenjang Fasilitas Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Puskesmas, RSUD, BPJS, dll	OLS	VAR	Kausalitas Granger	Sig (+)	Tidak Berpengaruh Sig
Wilhelmus Mahuze et al. (2022), Angga Setiawan & Fikriah (2020), Rizky Amelia & Siti Norma (2018), Puti Andiny & Merlindiana (2018), Endah Susanti & Nur Hidayat (2020), Susilawati & Muhammad Syukri (2025), Cut Putri Wahyuni & Fikriah (2019), Mahendra (2020), Mahendra (2020), Puti Andiny & Merlindiana (2018), Rosdiana Sijabat (2022), Wahyuni (2019), Ubaidillah (2021), Rahmat (2020), Sari (2017), Amelia (2019), Agnes Lutherani et al. (2023), Bognet (2023)	Wilhelmus Mahuze et al. (2022), Angga Setiawan & Fikriah (2020), Cut Putri Wahyuni & Fikriah (2019), Rizky Amelia & Siti Norma (2018), Endah Susanti & Nur Hidayat (2020), A. Mahendra (2020), Susilawati & Muhammad Syukri (2025), Agnes Lutherani et al. (2023)	Wilhelmus Mahuze et al. (2022), Angga Setiawan & Fikriah (2020), Rizky Amelia & Siti Norma (2018), Puti Andiny & Merlindiana (2018)	A. Mahendra (2020), Endah Susanti & Nur Hidayat (2020)	Jaman (2016); Yusoff & Febrina (2014)	Rosdiana Sijabat (2022), Shazia Kousar et al. (2023), Agnes Lutherani et al. (2023), Wilhelmus Mahuze et al. (2022), Angga Setiawan & Fikriah (2020), Rizky Amelia & Siti Norma (2018), Puti Andiny & Merlindiana Gus Puja Sari (2018), Ismail (2021), Cahyani et al. (2024), Susilawati & Muhammad Syukri (2025), Endah Susanti & Nur Hidayat (2020).	Cut Putri Wahyuni & Fikriah (2019), Agnes Lutherani et al. (2023), Mongan (2019), Palenewen et al. (2018), A. Mahendra (2020).

Baharudin Akbar, 2025

PENGARUH ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA PERIODE 2016-2023

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2.3 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis penelitian ini didasarkan secara khusus kepada teori *Human Capital* yang dikembangkan Hildebrand (1995). Dalam karya ilmiahnya, Hildebrand menegaskan bahwa modal manusia yang meliputi pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama yang secara langsung mempengaruhi produktivitas individu. Hildebrand memandang pembangunan manusia tidak hanya sebagai dimensi ekonomi, melainkan juga sosial dan budaya, sehingga penanaman modal pada pendidikan dan kesehatan berimplikasi pada peningkatan kapabilitas individu dalam masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Teori ini sangat penting untuk menjelaskan bagaimana variabel anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan dapat menjadi faktor penentu dalam variabel pembangunan manusia, dan memberikan landasan untuk menguji hipotesis bahwa anggaran yang ditanamkan pada pendidikan dan kesehatan berdampak positif terhadap pembangunan manusia (Hildebrand 1995).

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori pembangunan manusia dari Sen (1999) sebagai dasar konseptual utama. Sen memperkenalkan Pendekatan Kapabilitas (*Capability Approach*), yang menyatakan bahwa pembangunan tidak hanya sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan perluasan kebebasan dan kemampuan individu dalam menjalani kehidupan yang bermakna. Dalam karya ilmiah, teori ini membantu memandang pembangunan manusia secara holistik, dimana investasi dari pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga memperkuat kapasitas dan kebebasan individu. Sen menegaskan bahwa hal ini memperluas peluang hidup yang berkualitas, termasuk kesehatan yang baik, pendidikan yang layak, serta partisipasi sosial dan politik, yang kesemuanya merupakan aspek penting dari pembangunan manusia (Nussbaum et al. 2011 & Sen 1999).

Penggabungan teori Hildebrand dan Sen memberikan fondasi kuat untuk menganalisis hubungan kompleks antara anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan pembangunan manusia. Teori *Human Capital* Hildebrand menggarisbawahi

bagaimana modal manusia sebagai aset ekonomi terbentuk melalui investasi pemerintah yang efektif di sektor pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, teori Amartya Sen menambahkan dimensi nilai kemanusiaan dan kebebasan yang harus diperhatikan dalam pembangunan, sehingga memperjelas bahwa hasil investasi anggaran ini harus mampu meningkatkan kapabilitas individu bukan hanya jumlah pendapatan atau angka statistik ekonomi semata.

Variabel pertama dalam penelitian ini adalah anggaran pendidikan, yang merupakan alokasi dana dari pemerintah untuk sektor pendidikan yang meliputi segala bentuk pengeluaran dari gaji tenaga pendidik, pengadaan fasilitas pendidikan, hingga pengembangan program pendidikan khusus yang bertujuan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan (Arifi et al. (2018). Dalam karya ilmiah, variabel ini harus didefinisikan secara operasional agar dapat diukur dengan valid. Faktor utama yang memengaruhi anggaran pendidikan meliputi besaran alokasi dana, efektivitas distribusi, dan efisiensi penggunaan anggaran, khususnya di daerah dengan kebutuhan pendidikan yang beragam (Tanjung Sari (2022). Indikator yang umum digunakan untuk mengukur efektivitas anggaran pendidikan antara lain proporsi anggaran pendidikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), rasio gaji guru terhadap keseluruhan anggaran pendidikan, serta tingkat partisipasi sekolah yang mencerminkan luasnya akses dan kualitas pendidikan (Mongan 2019).

Variabel kedua adalah anggaran Kesehatan, yang juga memegang peran vital dalam kerangka pembangunan manusia. Anggaran ini mencakup dana pemerintah yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan kesehatan seperti pengembangan fasilitas kesehatan, perlengkapan medis, dan penyediaan layanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh masyarakat Sachs (2015) dan Tim Penyusun Pusat Kajian Anggaran DPR RI (2016). Dari perspektif ilmiah, variabel ini harus didefinisikan dengan spesifik meliputi berbagai faktor seperti distribusi anggaran yang adil, tingkat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, serta kualitas layanan yang ditawarkan. Indikator pengukuran yang digunakan meliputi rasio

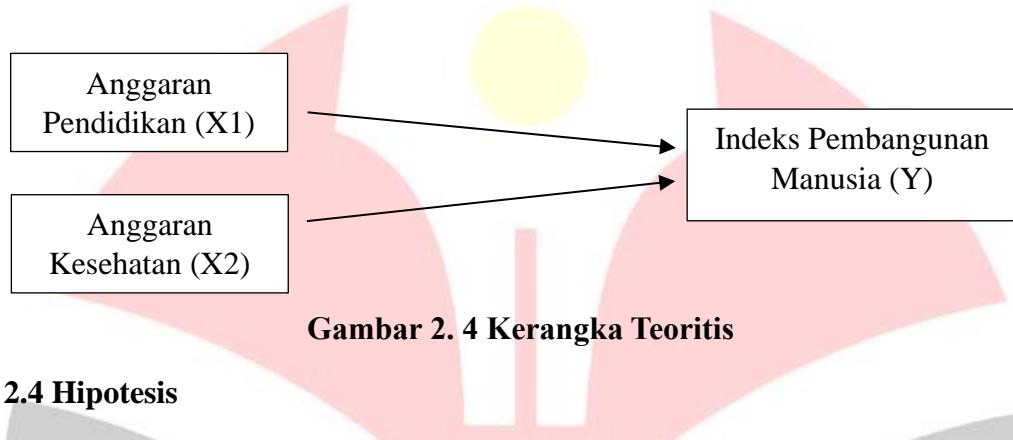
anggaran kesehatan terhadap PDB, persentase gaji tenaga medis dari anggaran kesehatan, dan indikator kesehatan masyarakat seperti angka harapan hidup serta cakupan imunisasi lengkap (WHO 2010). Dengan data tersebut, penelitian dapat menganalisis kontribusi anggaran kesehatan dalam memperkuat modal manusia dan kualitas sumber daya yang berdampak pada pembangunan manusia.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembangunan manusia, yang digambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses multidimensional yang mencakup peningkatan kualitas hidup melalui pemenuhan aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat (UNDP 2019 & Sen 1999). Faktor yang memengaruhi pembangunan manusia dapat dirinci menjadi kualitas pendidikan, kesehatan yang optimal, dan pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar. Indikator yang digunakan dalam mengukur pembangunan manusia melibatkan rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan pendapatan per kapita yang disesuaikan dengan parity daya beli (UNDP 2020). Ketiga indikator tersebut merupakan dimensi utama dalam IPM yang sudah diterima secara luas sebagai alat pengukur kualitas hidup dan kemajuan pembangunan suatu negara.

Penggunaan kerangka teoritis ini bertujuan untuk membangun argumen yang sistematis, dimana setiap variabel dikaji berdasarkan bukti empiris maupun konseptual dari teori yang telah teruji. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan hasil statistik yang bermakna tetapi juga memberikan kontribusi akademik melalui penerapan teori yang relevan dan komprehensif.

Pendekatan ini dijalankan pada penelitian untuk mengelaborasi bagaimana pengalokasian anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan dapat berkontribusi pada pembangunan manusia di Indonesia. teori Hildebrand dan Amartya Sen mendukung argumen bahwa alokasi yang baik dan berkelanjutan pada dua sektor tersebut merupakan investasi modal manusia yang strategis demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas dan berkelanjutan.

Dari penjelasan diatas, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut:



2.4 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan adanya pengaruh simultan antara anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap pembangunan manusia, yang menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikut hipotesis yang disebutkan:

1. Anggaran Pendidikan Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Anggaran Kesehatan Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.